

**PEMBANGUNAN EKONOMI DESA  
MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
DI DESA KEMIRI KECAMATAN PANTI  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MOH. MARYUS**  
NIM 083 134 043

Dosen Pembimbing:

**Ahmadiono, M.E.I**  
NIP. 19760401 200312 1 005

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JANUARI 2018**

**PEMBANGUNAN EKONOMI DESA  
MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
DI DESA KEMIRI KECAMATAN PANTI  
KABUPATEN JEMBER**

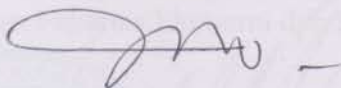
**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

**MOH. MARYUS**  
NIM: 083 134 043

Disetujui Pembimbing



**AHMADIONO, M.E.I**  
NIP. 19760401 200312 1 005

**PEMBANGUNAN EKONOMI DESA  
MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
DI DESA KEMIRI KECAMATAN PANTI  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at  
Tanggal : 12 Januari 2017

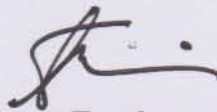
Tim Penguji

Ketua



**Nurul Setianingrum, MM**  
NIP. 19690523 199803 2 001

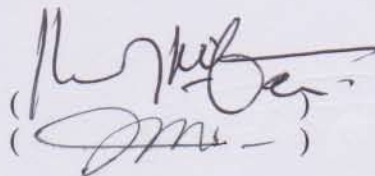
Sekretaris



**Toton Fanshurna, M.E.I**  
NIP. 19811224 201101 1 008

Anggota :

1. Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si
2. Ahmadiono, M.E.I



Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Moch. Cholip, S.Ag., MM**  
NIP. 19710727 200212 1 003

## MOTTO

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا  
فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra'du 11)\*

IAIN JEMBER

---

\* Depag RI, *Al-Quran*, (Semarang, PT KaryaToha Putra, 1999), 251

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta senantiasa mengilhamkan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Almarhum Bapak Kut Ali yang tiada pernah lelah dalam berkorban, mengayomi mendukung serta memberi pesan terakhir untuk tidak berhenti kuliah. Ibu Wasi'a yang tiada pernah mengeluh membesarkan, mendidik, merawat, mendukung serta mendoakan saya hingga saat ini.
2. Keluarga besar tercinta (K-OneES 2013, Ik Mabaya, IMABU, Bescame k3, Kontrakan Mewah dan penghuni Kontrakan Probolinggo) yang tiada henti memberi semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Organisasi pergerakan mahasiswa islam indonesia yang telah memberi motivasi, ilmu dan pengalaman yang tak dapat saya lupakan.
4. Semua teman-teman ekonomi syariah yang telah memberi sumbangsih serta ilmu dalam berbagi pengetahuan..
5. Almamater IAIN Jember.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyeleksian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M..S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ahmadiono, M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Segenap dosen IAIN Jember yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan berkah.
7. Kepala Desa Kemiri dan segenap pengurus BUMDes Kembang yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Terimakasih kepada seluruh tim penguji: 1) Nurul Setianingrum, MM 2) Dr. Khamdan Rifa'i SE.,M.S.i 3) Ahmadiono, M.E.I 4) Toton Fanshurna, M.E.I

Semoga amal baik yang telah bapak dan ibu berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini ada kekurangan baik dari segi bahasa, penyusunan maupun teori yang tertulis. Oleh sebab itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun kepada pembaca agar selanjutnya lebih baik lagi. Semoga apa yang sudah ditulis dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya penulis, Amin.

Jember, 17 Desember 2017

MOH. MARYUS

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

Moh. Maryus, Ahmadiono, M.E.I., 2017: *Pembangunan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.*

Dalam mengentaskan kemiskinan, pemerintah telah mencanangkan berbagai program pembangunan pedesaan. Salah satunya ialah melalui badan usaha milik desa (BUMDes), sesuai dengan Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pembubaran badan usaha milik desa yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.

Fokus masalah yang diteliti: 1) Bagaimana tata kelola/pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember? 2) Apa saja sektor usaha yang dimiliki BUMDes di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember? 3) Bagaimana kontribusi BUMDes bagi pembangunan ekonomidi Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember?

Tujuan dalam penelitian ini adalah:1) Untuk mendeskripsikan bagaimana tata kelola/pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. 2) Untuk mendeskripsikan sektor-sektor usaha yang dimiliki BUMDes di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. 3) Untuk mendeskripsikan kontribusi BUMDes bagi pembangunan ekonomi desa di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Keabsahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1. BUMDes Kembang dalam pengelolaannya, a) membuat AD/ART sebagai landasan kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes, b) membentuk pengurus yang terdiri dari badan pengawas, manajer, sekretaris, bendahara dan kepala unit bidang usaha, c) dalam pengelolaannya BUMDes Kembang menerapkan prinsip-prinsip korporatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan subtainabel. 2. Jenis-jenis usaha yang dijalani BUMDes Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti terdiri dari empat bidang yang terus berjalan antara lain: pasar desa, HIPAM, pos desa, ekonomi kreatif. Sedangkan pertokoan, perdagangan hasil pertanian difakumkan. 3. BUMDes dapat memberikan sebuah kontribusi pada segi pelayanan (pembayaran listrik, angsuran, pengiriman barang, uang dan lain sebagainya), memberikan bantuan berupa simpan pinjam perempuan untuk kegiatan usaha, dan bantuan sosial berupa santunan fakir miskin dan anak yatim, khitanan massal dan pengajian. BUMDes Kembang tidak dapat memberikan kontribusi bagi PADes Kemiri karena pendapatan yang dihasilkan masih kecil hanya cukup untuk membiayai kegiatan operasional BUMDes.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	17

1. Pembangunan Ekonomi Pedesaan.....	17
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Subyek penelitian .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisa Data .....	44
F. Keabsahan Data .....	46
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	47
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	55
C. Pembahasan Temuan .....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

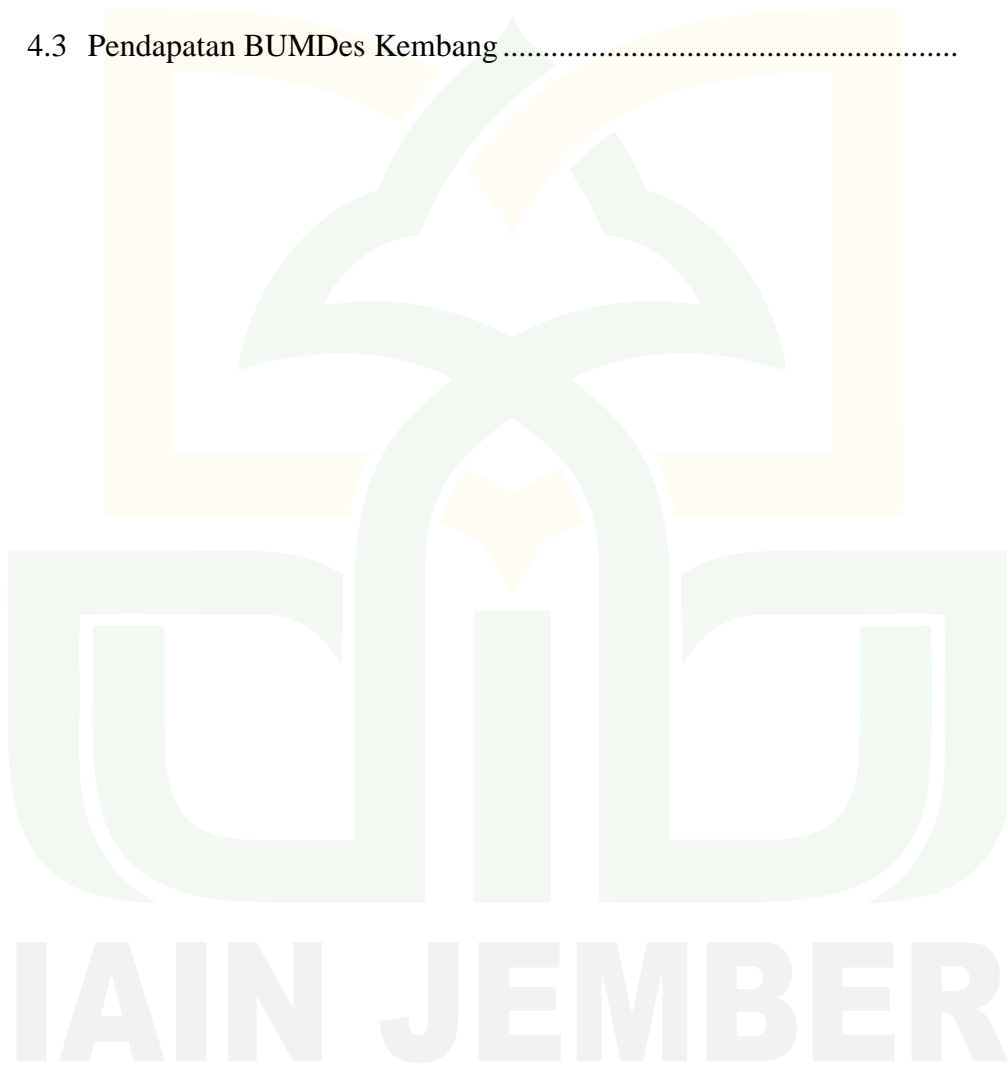
## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Matrik Penelitian
2. Jurnal Penelitian
3. Daftar Pertanyaan Wawancara
4. Surat Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Dokumentasi
7. Pernyataan Keaslian Tulisan
8. Biodata Penulis



## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1.	Tabel Tabulasi .....	14
4.1	Luas Wilayah Desa Kemiri.....	51
4.2	Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	52
4.3	Pendapatan BUMDes Kembang.....	75



## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Struktur Organisasi BUMDes Kembang.....	55



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, pemerintah Indonesia terdiri pada wilayah provinsi, dan kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa/kelurahan.<sup>1</sup>

Hingga saat ini Indonesia masih terus berkuat dengan kemiskinan. Jika dibandingkan dengan awal kemerdekaan, saat ini Indonesia telah berhasil menekan kemiskinan, namun belum sepenuhnya berhasil menuntaskan kemiskinan. Salah satu masalah besar yang dihadapi berbagai wilayah Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah, kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Jangan heran jika tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) juga bervariasi dari satu daerah dengan daerah lainnya. Ada daerah yang penduduk miskinnya sangat banyak dan ada daerah lain yang penduduk miskinnya sedikit.<sup>2</sup>

Kemiskinan merupakan masalah paling kompleks karena menjadi problem bangsa ini secara turun temurun yang belum teratasi hingga akar dan

---

<sup>1</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta:Erlangga, 2011), 1.

<sup>2</sup>Sukidin, *Ekonomi Pembangunan: Konsep, Teori dan Implementasinya* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009), 246.

sulit untuk dihilangkan dari kehidupan masyarakat. Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan cukup banyak. Mereka menjadi bagian komunitas struktur dan kultur pedesaan. Kira-kira separuh dari jumlah itu benar-benar berada dalam kategori sangat miskin. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan mereka sehingga mereka mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi. Nampak tidak terlalu berlebihan apabila dinyatakan bahwa medan perang melawan kemiskinan dan kesenjangan yang utama sesungguhnya berada di desa. Oleh karenanya usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian.<sup>3</sup>Sesuai dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”.<sup>4</sup>Dengan adanya program pemerintah yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran diharapkan dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Negara Indonesia.

Problem kemiskinan menjadi penting khususnya pejabat pemerintahan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melepaskan negeri ini dari belitan kemiskinan. Salah satu persoalan mendasar dalam proses

---

<sup>3</sup>Suyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 31.

<sup>4</sup>Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 4.

penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah maupun desa, adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan.<sup>5</sup>

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini pemerintahan desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Diaturnya desa dengan Undang-Undang tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintahan untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi-misi Undang-Undang tersebut, dimana negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Dalam Undang-undang tersebut diatur tentang perlunya menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk di dalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan tatakelola keuangan pemerintah pusat, daerah dan desa.<sup>6</sup> Dengan demikian desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan tersendiri untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>5</sup>Moch. Solehkan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), 1.

<sup>6</sup>Chabib Soleh dan Heru Rochmasjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2015), 1.



Kewenangan adalah hak yang melekat dan diserahkan sepenuhnya kepada desa, dan pengambilan keputusan serta akuntabilitas terletak pada desa.<sup>7</sup>

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan pelayan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.<sup>8</sup>

Pembangunan desa dapat dikatakan menempati bagian paling dominan mengisi wawacana pembangunan daerah. Hal tersebut bukan saja didasarkan atas fisik geografis, sumber daya alam, atau sumber daya manusianya, tetapi juga di dalamnya menyimpan potensi-potensi ekonomi (kesenjangan ekonomi) yang harus dikenali dan diperbaiki.<sup>9</sup>

Dalam mengentaskan kemiskinan, pemerintah telah mencanangkan berbagai program pembangunan pedesaan. Salah satunya ialah melalui badan usaha milik desa (BUMDes), sesuai dengan Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pembubaran badan usaha milik desa yang

---

<sup>7</sup>Didik G. Sugiarto, *Membangun Kemandirian Desa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 13-14.

<sup>8</sup>Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan*, 1.

<sup>9</sup>Gunawan Sumdiningrat, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), 199.

menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Secara administratif Kabupaten Jember terbagi ke dalam 31 kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan, 959 dusun/lingkungan, 4.100 RW dan 13.786 RT.<sup>10</sup>Dari 229 desa yang ada di Kabupaten Jember, sampai saat ini desa yang memiliki BUMDes mencapai masih 72 desa.<sup>11</sup> Hal ini tentu menjadi sebuah perhatian besar bagi pemerintah Kabupaten Jember maupun pemerintahan desa untuk memantau dan mengembangkan potensi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang ada di Kabupaten Jember.

Badan usaha milik desa (BUMDes) “KEMBANG” di Desa Kemiri adalah sebuah badan usaha milik pemerintah Desa Kemiri yang didirikan pada Tahun 2008, sesuai dengan Perdes No. 3 Tahun 2007 dan mengacu terhadap undang-undang No. 8 Tahun 2005 tentang pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat guna menggali potensi-potensi yang terdapat di setiap sektor.<sup>12</sup>Menurut Budi Satrio BUMDes Kembang yang berdiri tahun 2008 merupakan BUMDes yang berdiri pertama kali dan menjadi acuan bagi seluruh BUMDes yang ada di Kabupaten Jember. Selain itu, BUMDes Kembang juga memiliki unit-unit usaha yang sudah

---

<sup>10</sup><https://jemberkab.go.id/selayang-pandang/penduduk>, 26 November 2017, Jam 05.45 WIB

<sup>11</sup>Dokumen, Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2016

<sup>12</sup><http://desakemiripanti.blogspot.co.id/2016/10/bumdes-kembang-2016>(11 juni 2017, 14.30 WIB)

berjalan kurang lebih sepuluh tahun, diantaranya air minum desa, pasar desa dan lain-lain.<sup>13</sup>

Dari uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pembangunan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola/pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember?
2. Apa saja sektor usaha yang di miliki BUMDes di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember?
3. Bagaimana kontribusi BUMDes bagi pembangunan ekonomi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap tindakan. Dengan demikian tujuan memegang peranan yang sangat penting dan harus dirumuskan dengan jelas dan mendetail, karena tujuan merupakan jawaban tentang masalah yang akan diteliti.<sup>14</sup>

Untuk dapat menjelaskan penelitian ini dengan baik dan tepat sasaran, maka peneliti harus mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>13</sup>Budi Satrio, Karyawan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, *Wawancara*, Jember, 05 Juni 2017

<sup>14</sup>Moh. Kasiram, *Metode Peneliti Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2008), 51-52.

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana tata kelola/pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember
2. Untuk mendeskripsikan sektor-sektor usaha yang dimiliki BUMDes di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember
3. Untuk mendeskripsikan kontribusi BUMDes bagi pembangunan ekonomi desa di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.<sup>15</sup>

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara teoritik berupa adanya kesesuaian teori pembangunan ekonomi desa melalui BUMDes dengan realita yang ada di lapangan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Dengan penelitian yang saat ini dilakukan bisa menambah pengalaman yang lebih mendalam lagi bagi peneliti tentang cakrawala penelitian yang lebih baik kedepannya.

---

<sup>15</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

b. Bagi Lembaga IAIN Jember

Penelitian ini semoga dapat menjadi referensi bagi pihak IAIN Jember dan memberikan kontribusi dalam menambah wawasan pengetahuan tentang pembangunan ekonomi desa.

c. Bagi Pemerintahan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan perekonomian Desa.

d. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan informasi serta pengetahuan tentang bagaimana pembangunan ekonomi desa.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.<sup>16</sup>Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman makna istilah sebagai mana yang dimaksud oleh peneliti. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pembangunan Ekonomi

Secara umum pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan suatu kegiatan ekonominya, sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasinya dari pembangunan diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat

<sup>16</sup>Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

pendapatan meningkatkan dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi.<sup>17</sup>

## 2. Desa

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 1, Ayat 12 menjelaskan bahwa “Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>18</sup>

## 3. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan yang secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 1, Ayat (6), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Dimana badan usaha ini dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan-Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 3.

<sup>18</sup>Solehkhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 17.

<sup>19</sup>Ibid., 72.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>20</sup> Keseluruhan penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, dan setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab, hal ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, oleh karena itu kami akan diskripsikan secara singkat mengenai keseluruhan pembahasan.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian terdahulu (1) Yeni Fajarwati. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang 2016 dengan judul “Implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang” (2) Herlina, UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2012 skripsi dengan judul “Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kehidupan masyarakat ditinjau menurut ekonomi islam (Studi di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)” (3) Tasbih Fajri, Universitas Hasanuddin Makassar 2015 skripsi dengan judul “Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng”. Selain itu terdapat kerangka teoritik tentang pembangunan ekonomi desa (pembangunan masyarakat desa,

---

<sup>20</sup>Ibid., 45.

agroindustri, pembangunan desa berkelanjutan, industrialisasi desa-*democratic governace*) dan badan usaha milik desa (BUMDes) yang yang terdiri dari: pendirian, jenis-jenis usaha, pengelolaan dan kontribusi BUMDes bagi pembangunan ekonomi desa.

Bab ketiga berisi metode penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulam data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat berisi mengenai gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta membahas temuan. Bagian ini adalah pemaparan data yang diperoleh di lapangan dan juga menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ini berisi tentang berbagai temuan hasil analisa dari bab-bab sebelumnya, sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut bab bersifat konstruktif.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung pemenuhan kelengkapan data skripsi.

IAIN JEMBER



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu. Kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>21</sup>

Adapun kajian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Yeni Fajarwati. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang 2016 dengan judul “Implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) payung hukum tingkat daerah tentang pengelolaan BUMDes terlambat dibuat dikarenakan pemerintah daerah melalui BPMPPD Kabupaten Tangerang membentuk Perda dan Perbup mengenai BUMDes mengacu pada UU Desa No. 14 Tahun 2014 tentang desa 2) sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan program BUMDes secara kuantitas masih sangat kurang 3)

---

<sup>21</sup>Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 45.

pengelolaan admisnistrasi belum terkelola dengan baik 4) sumber daya finansial yang ada masih belum memenuhi dalam pelaksanaan program BUMDes 5) kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh para lembaga desa, terutama pelaksana BUMDes 6) kurangnya sosialisasi soal program BUMDes 7) belum ada pemasukan untuk kas desa dari BUMDes mandiri Pagedangan.<sup>22</sup>

2. Herlina, UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2012 skripsi dengan judul “Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kehidupan masyarakat ditinjau menurut ekonomi Islam (Studi di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)”. Penelitian ini menggunakan metode deduktif, induktif, dan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket dan studi pustaka. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui sumbangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meringankan kehidupan masyarakat 2) untuk mengetahui kehidupan masyarakat setelah mendapatkan sumbangan dan bantuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 3) tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemenuhan kehidupan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat berupa pinjaman dana, pendidikan, dan konsultasi atau bimbingan dalam berbagai bidang sehingga kehidupan masyarakat

<sup>22</sup>Yeni Fajarwati, *Implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang* (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa “Serang” 2016).

meningkat, baik melalui usaha dagang, pertanian, dan peternakan. Maka dari itu Islam memperbolehkan kegiatan muamalah seperti ini.<sup>23</sup>

3. Tasbih Fajri, Universitas Hasanuddin Makassar 2015 skripsi dengan judul “Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng”.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui peranan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil penelitian menunjukkan kepala desa sangat berperan baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan.<sup>24</sup>

Berikut hasil penelitian, perbedaan, dan persamaan dari ketiga penelitian terdahulu lebih rincinya di jelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tabel Tabulasi**

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Yeni Fajarwati. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang 2016. “Implementasi program Badan Usaha	1) payung hukum tingkat daerah tentang pengelolaan BUMDes terlambat dibuat dikarenakan pemerintah daerah melalui BPMPPD Kabupaten Tangerang	1) Lokasi penelitian 2) Fokus penelitian: implementasi progra	1) Metode penelitian kualitatif deskriptif 2) Objek penelitian yang menjadikan

<sup>23</sup>Herlina, *Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kehidupan masyarakat ditinjau menurut ekonomi islam (Studi di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)*(Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim “Riau” 2012).

<sup>24</sup>Tasbih Fajri, *Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng* (skripsi , Universitas Hasanuddin “Makassar” 2015).

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang”.	membentuk Perda dan Perbup mengenai BUMDes mengacu pada UU Desa No. 14 Tahun 2014 tentang desa 2) sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan program BUMDes secara kuantitas masih sangat kurang 3) pengeloaan admisnistrasi belum terkelola dengan baik 4) sumber daya finansial yang ada masih belum memenuhi dalam pelaksanaaan program BUMDes 5) kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh para lembaga desa. Terutama pelaksana BUMDes 6) kurangnya sosialisasi soal program BUMDes 7) belum ada pemasukan untuk kas desa dari BUMDes mandiri Pagedangan	m BUMDes, sedangkan peneliti pada pembangunngan ekonomi desa	BUMDes sebagai objek penelitian
2	Herlina, UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2012. “Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	1) BUMDes telah memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui dana pinjaman, memberikan seminar,	1) Lokasi penelitian 2) Tinjauan dari segi Islam	1) Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	dalam meningkatkan kehidupan masyarakat ditinjau menurut ekonomi islam (Studi di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)”	<p>pelatihan dan konsultasi dalam usaha</p> <p>2) Kontribusi BUMDes kepada masyarakat telah mampu meningkatkan perekonomian dan usaha mereka, disbanding sebelum mendapat pinjaman, konsultasi dan bimbingan BUMDes</p> <p>3) Dana pinjaman dan konsultasi yang diberikan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini merupakan sifat saling tolong menolong sesama muslim, maka dari itu agama membolehkan.</p>		
3	Tasbih Fajri, Universitas Hasanuddin Makassar 2015. “Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	kepala desa sangat berperan baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan	1) Fokus penelitian, lebih fokus pada peran kepala desa	1) Metode deskriptif 2) Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, kepustakaan, dan

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	(BUMDes) di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng”.			dokumentasi 3)Objek penelitian yang menjadika BUMDes sebagai objek penelitian

## B. Kajian Teori

### 1. Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Secara historis, pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon orde baru, yang muncul pada pelita 1 (1969-1974) yang melahirkan Direktorat Jendral Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri.

Namun dipertengahan 1980-an pembangunan desa kemudian diubah menjadi pembangunan masyarakat desa, sebab pembangunan desa sebelumnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, sehingga kurang menyentuh masyarakat. Direktorat Jendral Bangdes juga berubah menjadi Direktorat Jendral Pembangunan Masyarakat Desa, namun arus pemberdayaan yang hadir pada tahun 1990-an nomenklatur juga berubah Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertahan sampai sekarang. Ditjen ini masih akrab dengan nomenklatur pembangunan desa, karena pembangunan desa tertuang dalam PP No. 72/2005. Baik RPJMN maupun institusi Bapennas dan kementerian lain sama sekali tidak mengenal pembangunan desa, melainkan mengenal pembangunan

pedesaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga pembangunan desa tidak lagi menjadi agenda nasional tetapi dilokalisir menjadi dominan dan urusan desa.<sup>25</sup>

#### **a. Pembangunan Masyarakat Desa**

Pembangunan merupakan suatu proses yang berdimensi jamak (multidimensional), mencakup perubahan dan orientasi dan organisasi dalam sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pembangunan masyarakat desa diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama. Ada pula yang mengartikan pembangunan masyarakat sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pakar lain memberikan batasan bahwa pembangunan masyarakat adalah perpaduan antara pembagian sosial ekonomi dan pengorganisasian masyarakat.<sup>26</sup>

Prasyarat yang perlu diketahui untuk memberdayakan masyarakat desa adalah realita kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan masyarakat desa itu. Adapun kekuatan-kekuatan masyarakat desa meliputi:

---

<sup>25</sup>Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun* (Jakarta:Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 18-19.

<sup>26</sup>Adon Nasrullah Jamaluddin, *Sosiologi Pedesaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 4.

- 1) Secara kuantitas desa kaya akan SDM dan SDA
- 2) Masyarakat memiliki jiwa kekeluargaan dan kegotongroyongan yang kuat, menjunjung tinggi semangat kebersamaan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat
- 3) Masyarakat desa sangat religius, berperilaku sesuai dengan norma-norma agama yang dianut sehingga mereka lebih jujur, sabar dan ulet
- 4) Menghargai atau patuh terhadap pimpinan baik formal maupun nonformal.
- 5) Menjunjung tinggi dan mempertahankan tradisi sehingga mereka kurang terbuka terhadap perubahan
- 6) Masyarakat desa mudah diajak kerja sama untuk membangun desa, terutama pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah keseharian mereka.

Selain kekuatan-kekuatan yang dimiliki, masyarakat desa. Beberapa kelemahan-kelemahan masyarakat pedesaan itu meliputi:<sup>27</sup>

- 1) Kelemahan yang mendasar adalah rendahnya kualitas SDM. Tingkat pendidikan mereka sangat rendah. Akibatnya, masyarakat menjadi tidak berdaya memanfaatkan atau memobilisir SDA untuk meningkatkan kesejahteraannya. Karena itu peranan pendidikan nonformal menduduki posisi kunci untuk membekali masyarakat desa dengan pengetahuan yang praktis, sikap mental

---

<sup>27</sup>Vera A. R. Pasaribu, *Pembangunan Ekonomi Pedesaan* (Medan : Universitas HKBP Nommense, 2007), 21-23.



yang baik, dan keterampilan yang handal sehingga mereka mampu melaksanakan pembangunan secara efektif. Sisi lain yang berkaitan dengan penyebab rendahnya kualitas SDM di pedesaan adalah terjadinya arus urbanisasi angkatan kerja mudayang memiliki pola pikir dinamis dan rasional untuk bekerja pada industri-industri yang dipusatkan dikota. Akibatnya, SDM yang tinggal di desa adalah mereka yang pola pikirnya statis, tradisional dan sulit mengadopsi inovasi. Masalah urbanisasi yang tinggi di Indonesia terjadi akibat pemerintah kurang mengutamakan pembangunan industri pedesaan yang berbasis pada sektor pertanian

- 2) Kemiskinan primer, yaitu suatu keadaan dimana penghasilan yang mereka peroleh dari hasil usaha tani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok hidup sebagai manusia yang layak. Kesempatan kerja diluar sektor pertanian hampir tidak ada di pedesaan. Jumlah anak putus sekolah dan masyarakat yang tidak bisa baca tulis semakin besar seiring dengan rendahnya pendapatan. Diversifikasi dibidang pertanian tidak terlaksana karena rendahnya pendapatan, teknologi, tidak ada modal, kontak dengan sumber informasi dalam meningkatkan pengetahuan adalah sangat sangat jarang, dan harga yang tinggi dari sarana produksi pertanian terutama pupuk yang mejadi kebutuhan pokok

- 3) Posisi tawar masyarakat desa sangat lemah terutama waktu menjual hasil produksi usaha tani. Mereka selalu dalam posisi yang dirugikan dan menjadikan mereka semakin miskin dan tidak berdaya
- 4) Masyarakat desa tidak mau atau menolak inovasi, walaupun ada hanya terbatas pada beberapa orang saja. Hal ini berhubungan dengan kehidupan mereka yang terikat pada tradisi. Mereka lebih yakin bahwa apa yang mereka miliki adalah yang terbaik.

#### **b. Agroindustri dalam Membangun Pedesaan**

Integrasi antara konsep dan pembangunan desa menjadi penting keterkaitannya dalam penyediaan dan penyaluran sarana produksi, penyediaan dana dan investasi, teknologi serta dukungan sistem tataniaga dan perdagangan yang efektif. Pengembangan agroindustri pada dasarnya diharapkan selain memacu pertumbuhan tingkat ekonomi, juga sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani.<sup>28</sup>

Departemen pertanian menyebutkan bahwa kawasan agropolitas/agroindustri memiliki persyaratan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Sumber daya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar serta berpotensi atau telah berkembang diverifikasi usaha dari komoditi unggulan.

---

<sup>28</sup>Ibid., 31.

<sup>29</sup>Jamaluddin, *Sosiologi Pedesaan*, 201.

- 2) Berbagai sarana dan prasarana pertanian yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis.
- 3) Sarana dan prasarana umum yang memadai, seperti transportasi, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain-lain.
- 4) Sarana dan prasarana kesejahteraan sosial atau masyarakat yang memadai, dan kelestarian lingkungan hidup, baik kelestarian sumber daya alam, kelestarian sosial budaya maupun keharmonisan hubungan kota desa terjamin.

### **c. Pembangunan Desa yang Berkelanjutan**

Pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan secara luas sebagai kegiatan-kegiatan disuatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dimasa sekarang tanpa membahayakan daya dukung sumberdaya bagi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Tantangan pembangunan berkelanjutan adalah menemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan sumberdaya secara bijaksana.

Arus globalisasi yang semakin kuat perlu diimbangi dengan kesadaran bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu memecahkan masalah ketimpangan sumber daya. Kebijakan pembangunan harus memberi perhatian untuk perlunya menata kembali landasan sistem pengelolaan aset-aset di wilayah pedesaan. Penataan kembali tersebut lebih berupa integrasi paada pemanfaatan ganda, yaitu ekonomi dan lingkungan/ekosistem. Walaupun wawasan agroekosistem merupakan

suatu pengelolaan yang kompleks dan rumit, akan tetapi keberhasilannya dapat dilihat dan dirumuskan dengan indikator-indikator antara lain: kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan lokal, kontribusi terhadap keberlanjutan sumber daya alam, kontribusi terhadap keberlanjutan lapangan kerja, kontribusi terhadap keberlanjutan teradap ekonomi makro, efektifitas biaya dan kontribusi teradap kemandirian teknis.

Menurut Wibowo ada empat aspek ciri-ciri spesifik terpenting mengenai konsep agroekosistem. Empat aspek umum tersebut adalah: pemerataan (*equitability*), keberlanjutan (*sustainability*), kestabilan (*stability*), dan produktifitas (*produktivity*).

Secara sederhana *equitability* merupakan penilaian tentang sejauh mana hasil lingkungan sumberdaya didistribusikan diantara masyarakatnya. *Sustainability* dapat diberi pengertian sebagai kemampuan sistem sumberdaya mempertahankan produktifitasnya, walaupun menghadapi berbagai kendala. *Stability* merupakan ukuran tentang sejauh mana produktivitas sumberdaya bebas dari keragaman yang disebabkan oleh fluktuasi faktor lingkungan. *Produktivity* adalah ukuran sumber daya terhadap fisik dan ekonominya. Dimasa yang akan datang, dalam konteks pembangunan desa berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya di desa haruslah dilaksanakan dalam satu pola yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, menjaga keseimbangan biologis, memelihara kelestarian dan bahkan

memperbaiki kualitas sumber daya alam sehingga dapat terus diberdayakan, serta menerapkan model pemanfaatan sumberdaya yang efisien.<sup>30</sup> Dengan demikian, pembangunan yang telah dilakukan secara terencana dan sadar oleh masyarakat dan pemerintah haruslah mempertimbangkan aspek-aspek jangka panjang yang dapat dirasakan oleh generasi-generasi bangsa dimasa yang akan datang. Makna dan arti pembangunan itu akan hilang ketika pembangunan hanya dirasakan oleh mereka yang berjuang pada saat ini, sementara generasi-generasi mendatang tidak tahu-menahu apa yang diperbuat oleh gerasi terdahulu.<sup>31</sup>

#### **d. Industrialisasi Desa-*Democratic Governance***

Jika pembangunan dimaksudkan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, maka dalam konteks negara Indonesia pembangunan harus ditekankan pada wilayah perdesaan, lebih khusus lagi rakyat yang berdaulat pada kegiatan pertanian. Ada beberapa alasan untuk menjelaskan hal tersebut. *Pertama*, pertanian merupakan sektor yang bertanggungjawab menyediakan kebutuhan pangan masyarakat sehingga eksistensinya mutlak diperlukan. *Kedua*, sektor pertanian ikut menyediakan bahan baku (*raw material*) bagi sektor industri (agroindustri) sehingga proses produksi aktivitas industri dapat terus berlangsung. *Ketiga*, sektor pertanian turut memberi kontribusi meningkatkan besarnya devisa negara dengan komoditas

<sup>30</sup>Pasaribu, *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*, 34-35.

<sup>31</sup>Syarif Makmur, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektifitas Organisasi-Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 146.

yang dapat di ekspor. *Keempat*, pertanian merupakan sektor yang menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja perdesaan, 51% dari seluruh angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian.<sup>32</sup>

Semua itu dapat diwujudkan oleh industri yang maju, pertanian yang tangguh, koperasi yang sehat, serta perdagangan yang berhasil dengan sistem distribusi yang baik. Kemitraan usaha yang baik antara badan usaha, negara dan swasta, pendayagunaan sumber daya alam yang optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, serta dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara profesional akan mendorong upaya perekonomian nasional.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, berbagai upaya perbaikan di sektor pertanian harus dikerahkan. Menyadari besarnya penduduk Indonesia yang hidup dan tergantung pada sektor pertanian, upaya-upaya perbaikan di sektor ini menjadi titik sentral guna mewujudkan pertanian yang tangguh. Strategi pembangunan pertanian harus mampu memecahkan kendala-kendala yang masih dihadapi dan salah satu permasalahan yang sangat perlu diperhatikan adalah masalah SDM pertanian.

## **2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

BUMDes sebagai lembaga usaha yang dimiliki oleh pemerintah desa ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam mengembangkan dan

---

<sup>32</sup>Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baksh, *Konsep Ekonomi Kelembagaan Perdesaan, Pertanian & Kedaulatan Pangan* (Malang: Empat Dua, 2016), 57.

mendorong perekonomian desa, dengan harapan dapat menciptakan sumberdaya ekonomi baru untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan sumber alam desa.

BUMDes sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*comirciel institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>33</sup> Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam disetiap desa di Indonesia. Ragam

---

<sup>33</sup>Depatemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Malang: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), “Universitas Brawijaya”, 2007), 3-4.

bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.<sup>34</sup>

Ciri utama BUMDes yang membedakan komersial lain adalah (1) Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama; (2) Modal usaha sebesar lima puluh satu persen berasal dari dana desa empat puluh sembilan persen berasal dari dana masyarakat; (3) Operasionalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal; (4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha; (5) Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun; (6) Fasilitas ditunjang oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa; dan (7) Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi oleh pemerintah desa, BPD beserta anggota.<sup>35</sup>

#### a. Pendirian BUMDes

Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan desa dalam gerakan usaha ekonomi desa (vide pasal 87 ayat (1) UU Desa, pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes). Frase “dapat mendirikan BUMDes” dalam peraturan perundang-undangan tentang desa tersebut menunjukkan

<sup>34</sup>Zulkarnain Ridlwan, *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa* (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016), 428.

<sup>35</sup>Edy Yusuf Agunggunanto dan Darwanto, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2016), 69.



pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Interpretasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang desa menghasilkan peta jalan (*road map*) pendirian BUMDes. Pendirian BUMDes atas prakarsa desa yang mempertimbangkan: (a) Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa; (b) Potensi usaha ekonomi desa; (c) Sumber daya alam di desa; (d) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan (e) Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang disediakan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.<sup>36</sup>

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemdes.

---

<sup>36</sup>Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, 26-27.

Dinyatakan dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud kebutuhan dan potensi desa adalah:<sup>37</sup>

- 1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok;
- 2) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutamatekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- 3) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- 4) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara persial dan kurang terakomodasi.

#### **b. Jenis-jenis Usaha**

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:<sup>38</sup>

- 1) Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
- 2) Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- 3) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;
- 4) Industri dan kerajinan rakyat

<sup>37</sup>Depatemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan*, 5.

<sup>38</sup>Ibid., 6.

BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan semata, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 19 Permendesa PDTT Nomor 04 Tahun 2015, BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha dalam BUMDes dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:<sup>39</sup>

- 1) Air minum Desa
- 2) Usaha listrik Desa
- 3) Lumbung pangan
- 4) Sumber daya lokal teknologi

Berdasarkan Pasal 20 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, BUMDes dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa. Unit usaha dalam BUMDes dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:

- 1) Alat transportasi;
- 2) Perkakas pesta;
- 3) Gedung pertemuan;
- 4) Rumah toko;
- 5) Tanah milik BUMDes; dan

---

<sup>39</sup>Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Jakarta: Penerbit Pustaka, 2015), 586.

6) Barang sewa lainnya.

Berdasarkan Pasal 21 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, BUMDes dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Unit usaha dalam BUMDes dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:

- 1) Jasa pembayaran listrik;
- 2) Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;  
dan
- 3) Jasa pelayanan lainnya

Berdasarkan Pasal 22 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, BUMDes dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Unit usaha dalam BUMDes dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:

- 1) Pabrik es;
- 2) Pabrik asap cair;
- 3) Hasil pertanian;
- 4) Sarana produksi pertanian;
- 5) Sumur bekas tambang; dan
- 6) Kegiatan bisnis produksi lainnya.

Berdasarkan Pasal 23 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*finansial*)

*business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Unit usaha dalam BUMDes dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Sedangkan berdasarkan Pasal 24 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, BUMDes dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun skala kawasan perdesaan. Unit-unit usaha dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama. Unit usaha dalam BUMDes dapat menjalankan kegiatan usaha meliputi:

- 1) Pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya lebih menjadi ekspansif;
- 2) Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- 3) Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasi jenis usaha lokal lainnya.

### **c. Pengelolaan**

Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada AD/ART. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah desa dan paling sedikit terdiri atas:

- 1) Penasehat atau komisaris
- 2) Pelaksana operasional atau direksi:

- a) Direktur atau manajer; dan
- b) Kepala unit usaha

Penasihat atau komisaris dipegang oleh kepala desa. Jika anggota penasehat dan komisaris ditambah maka disebut dewan komisaris/penasehat. Penasehat atau komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan pengelolaan usaha desa. Penasehat atau komisaris dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pelaksana operasional atau direksi bertanggung jawab kepada pemerintah desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan. Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan persyaratan:<sup>40</sup>

- 1) Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
- 2) Mendapat pembinaan manajemen;
- 3) Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- 4) Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; dan
- 5) Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

---

<sup>40</sup>Sukasmanto, *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDesa* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPB), 2014), 26.

Prinsip-prinsip tata kelola badan usaha milik desa (BUMDes):<sup>41</sup>

- 1) Prinsip umum pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)
  - a) Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
  - b) BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan penganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan pemdes. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, sesuai peraturan perundang-undangan.
  - c) BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok

---

<sup>41</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan*, 11.

miskin di pedesaan, mengurangi praktek minjam (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

- d) Pengelolaan BUMDes diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (Kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.
- e) Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah: (a) masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencarian disektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal; (b) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal



pengembangan usaha selanjutnya; (c) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ketangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat; dan yang terpenting adalah (d) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mandiri, mekanisme dan sistem pengelolaannya.

## 2) Prinsip pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)

Prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan persepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDes yaitu:

- a) Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b) Partisipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta untuk memberikan

dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

- c) Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus dilakukan sama tanpa harus memandang golongan, suku dan agama.
- d) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e) Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f) Subtainabel, kegiatan usaha dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerja sama (*kooperatif*), membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan pengangguran, dan membuka akses pasar.

#### **d. Kontribusi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesai pengertian kontribusi adalah sumbangan.<sup>42</sup>Sedangkan dalam bahasa inggris, kontribusi berasal dari kata *kontribute*, *contribution*, maknanya adalah

<sup>42</sup>Departemen Pendidikan Naional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 592.

keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan.<sup>43</sup> Kontribusi juga biasa dikenal dengan peranan, sedangkan menurut Gross Mason dan Mceachern peran adalah sebagian perangkat harapan-harapan yang dikenal pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.<sup>44</sup>

Kontribusi adalah ikut serta ataupun memberikan baik ide, tenaga dan lain sebagainya dalam kegiatan.<sup>45</sup> Adapun yang dimaksud dengan kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan.<sup>46</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa istilah kontribusi adalah sumbangan, peranan, masukan, ide juga perilaku yang dilakukan individu. Dengan demikian peranan berarti bagaian dari pelaksanaan fungsi dan tugas dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau kepentingan guna mencapai suatu yang diharapkan.

IAIN JEMBER

---

<sup>43</sup> Anne Akhira, *Terminologi Kosa Kata* ((Jakarta: Aksara, 2012), 77.

<sup>44</sup> Soekanto Soerjono, *Metode Riseach Jilid 1* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 99.

<sup>45</sup> Soerjono dan Djoenaesih, *Istilah Komunikasi* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 45.

<sup>46</sup> Gunadi dan Djoni, *Istilah Komunikasi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), 76.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sedangkan bentuk penelitian ini berbentuk deskriptif. Deskriptif disini adalah penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat obyek tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk melakukan penelitian secara terinci dan mendalam melalui

---

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 3.

pemaparan, penggambaran, serta menemukan fakta-fakta terhadap penerapan pembangunan ekonomi desa melalui BUMDes.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya.<sup>48</sup>

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian di dalam skripsi ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “KEMBANG” di Jl. Rengganis No. 02 Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember kode pos 68153. BUMDes Kembang merupakan lembaga usaha milik pemerintah Desa Kemiri, yang bergerak dalam bidang pengembangan dan penggalian potensi Desa Kemiri baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

## **C. Subyek Penelitian**

Dalam menentukan subyek penelitian, atau untuk menentukan siapa yang menjadi sumber data yang peneliti tuju, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *snowball*. Snowball adalah teknik pengambilan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi

---

<sup>48</sup>Ibid., 46.

yang dapat digunakan sebagai sumber data, dengan demikian jumlah sumber data akan semakin besar.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini subyek yang telah dijadikan sebagai informan adalah sebagai berikut:

1. Suryono (Kepala Desa Kemiri dan pengawas atau penasehat BUMDes Kembang Desa Kemiri)
2. Hadi Wiyono (Badan pengawas BUMDes Kembang Desa Kemiri)
3. Luluk Widyawati (Manajer BUMDes Kembang Desa Kemiri)
4. Moch. Eksan (Sekretaris dan kepala unit ekonomi kreatif di BUMDes Kembang Desa Kemiri)
5. Astro Prasetyo (Bendahara dan kepala Unit HIPPAM di BUMDes Kembang Desa Kemiri)
6. Kepala unit-unit Usaha BUMDes Kembang Desa Kemiri
  - a. Guswanto (Kepala Unit Pasar Desa)
  - b. Astro Prasetyo (Kepala Unit HIPPAM merangkap Bendahara)
  - c. Abdullah (Kepala Unit Pertokoan dan Perdagangan Hasil Pertanian)
  - d. Moch. Eksan (Kepala Unit Ekonomi Kreatif merangkap Sekretaris)
7. Anggota BUMDes Kembang Desa Kemiri Kec. Panti Kab. Jember (Alfia, Syaiful, Rusyati, Husnia, Aziz, dan Nur)

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian, maka data yang dikumpulkan haruslah *representatif*. Ketepatan

---

<sup>49</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 219.

dalam memilih metode memungkinkan diperolehnya data yang obyektif dan sangat menunjang keberhasilan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif pasif, dimana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian datang ke tempat penelitian dan mengamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>50</sup> Adapun data yang diperoleh dari metode ini adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi objek penelitian
- b. Letak geografis penelitian
- c. Tata kelola/pengelolaan dan jenis jenis usaha di BUMDes Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>51</sup> Jadi, dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

---

<sup>50</sup>Munawaroh, *Panduan Memahami Metode Penelitian* (Malang: Intimedia, 2013), 73.

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode*, 231.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara tak terstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas tanpa membawa dan membuat pedoman wawancara, hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada partisipan.

Adapun data yang akan diperoleh dari metode wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah terbentuknya BUMDes Kembang di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember
  - b. Tata kelola/pengelolaan BUMDes Kembang di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember
  - c. Jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember
  - d. Kontribusi BUMDes bagi pembangunan ekonomi desa di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
3. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik observasi dan wawancara peneliti juga menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya menumental dari seseorang.<sup>52</sup> Dengan demikian maka jelaslah bahwa metode dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan seperti: buku-buku, laporan, arsip, majalah dan lain sebagainya.

---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode*, 329.



Adapun data yang ingin diperoleh dari dokumentasi adalah:

- a. Sejarah berdirinya BUMDes di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember
- b. Data-data BUMDes seperti: data keanggotaan, data kepengurusan, data manajer.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit. Melakukan sintesa, penyusunan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipajami oleh diri sendiri dan orang lain.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka data yang diambil adalah data analisis deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati. Data-data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan lainnya.<sup>53</sup>

Metode analisis data deskriptif dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

##### **1. Reduksi data**

Reduksi data merupakan rangkuman, meneliti hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dari tema dan polanya. Dengan

---

<sup>53</sup>Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 62.

demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.<sup>54</sup>

## 2. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Adanya penyajian data dapat mempermudah peneliti memahami apa yang terjadi.

## 3. Verifikasi

Yakni penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan dengan ini dapat menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal. Temuan-temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti dapat menjadi jelas.

Sedangkan dalam pelaksanaan analisis data perlu adanya langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Adapun proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar dan sebagainya.
- b. Reduksi data yang telah dibaca, dipelajari dan ditelaah tersebut mungkin sangat banyak sekali jumlahnya sehingga memerlukan reduksi.

---

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode*, 247.

- c. Menyusun data hasil reduksi ke dalam satuan-satuan.
- d. Melakukan kategorisasi terhadap satuan-satuan data sambil membuat koding.
- e. Uji keabsahan data
- f. Penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substansi dengan menggunakan beberapa metode tertentu.
- g. Penarikan kesimpulan (penulisan laporan hasil penelitian).

#### **F. Keabsahan Data**

Bagian ini bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data yang diperoleh di lapangan. Dalam pengujian validitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dimana dilakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan melakukan berbagai cara dan berbagai waktu, hal tersebut dilakukan dengan cara:<sup>55</sup>

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif orang dengan berbagai pendapat pandangan orang lain

---

<sup>55</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 260.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Selayaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan melalui prosedur kerja yang berurutan. Keurutannya diperlihatkan melalui cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja penelitian dilalui tahapan-tahapan yaitu: tahapan sebelum lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan.

Tahap sebelum lapangan segala macam persiapan yang diperlukan sebelum penelitian terjun ke dalam kegiatan lapangan. Dalam tahap ini peneliti melakukan rancangan penelitian. Rencana ini berupa proposal penelitian, mengurus perijinan, dan instrumen penelitian.

Tahap selanjutnya yaitu tahap lapangan, dimana tahap lapangan adalah suatu tahapan dimana peneliti dengan sungguh-sungguh memahami latar belakang penelitian. Dalam tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang ditentukan.

Selanjutnya adalah tahap penulisan laporan, pada tahap ini penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Setelah data dianalisis barulah masuk pada tahap penulisan laporan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Kemiri didirikan pada tanggal 2 Januari 2008, sesuai dengan Perdes No. 3 Tahun 2007 dan mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat guna menggali potensi-potensi yang terdapat di setiap sektor. Badan usaha milik desa ini diberi nama badan usaha milik Desa Kemiri Membangun atau yang di singkat “BUMDes KEMBANG”.

BUMDes Kembang didirikan karena terlalu banyak nama program yang selalu muncul setiap kali terjadi pergantian kepala pemerintahan, baik yang muncul dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, sehingga itu menyulitkan pemerintahan yang baru. Oleh karenanya untuk menampung semua itu, kepala desa mempunyai gagasan ide untuk mendirikan BUMDes agar program dan pengelolaan aset desa dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Selain itu BUMDes didirikan untuk membantu dan mempermudah segala pelayanan kegiatan usaha yang ada di Desa Kemiri.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Suryono, Kepala Desa Kemiri, *Wawancara*, 14 September 2017.

Secara kelembagaan BUMDes Kembang merupakan lembaga usaha yang dimiliki pemerintah Desa Kemiri, yang bergerak dalam bidang pengembangan dan penggalian potensi Desa Kemiri baik potensi yang sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dasar pendirian BUMDes Kemiri mengacu pada:

- a. Perda No. 07 Tahun 2015
- b. Perbub
- c. Permendagri No. 09 Tahun 2010
- d. Perdes No. 03 Tahun 2007
- e. SK kepala desa

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung kegiatan ekonomi masyarakat Kemiri, baik yang berkembang menurut adat istiadat atau budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek pemerintah. Selain itu BUMDes Kembang mempunyai tujuan dan fungsi sebagai berikut.<sup>57</sup>

- a. Tujuan
  - 1) Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes)
  - 2) Memajukan dan mengembangkan perekonomian Desa Kemiri
  - 3) Mengumpulkan modal usaha sebagai sumber
  - 4) Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa

---

<sup>57</sup>Profil BUMDes Kembang.

b. Fungsi

- 1) Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 3) Meningkatkan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran
- 4) Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Kemiri
- 5) Memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat Desa Kemiri

**2. Lokasi/Letak Georafis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

BUMDes Kembang beralamatkan di Jl. Rengganis No. 02 Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember kode pos 68153.<sup>58</sup> BUMDes Kembang berada di lingkungan Kantor Pemerintahan Desa Kemiri dengan batas-batas wilayah Desa Kemiri adalah sebelah utara berbatasan dengan pengunungan Argopuro, sebelah timur berbatasan dengan dengan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Serut dan Desa Suci Kecamatan Panti, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Suci Kecamatan Panti.

Desa Demiri memiliki luas wilayah mencapai 1.578,584 Ha yang penggunaannya dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini.<sup>59</sup>

Tabel luas wilayah desa Kemiri menurut kegunaannya

---

<sup>58</sup>Profil BUMDes Kembang

<sup>59</sup>Profil Desa Kemiri

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Desa Kemiri**

NO	PENGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)
1.	Sawah Pertanian	
	a. Irigasi Tehnis	262.700
	b. Irigasi Tadah Hujan	5.494
	c. Irigasi Desa	22.390
2.	Pemukiman dan Pekarangan	142.500
3.	Tegalan	94.000
4.	Kuburan	1.500
5.	Perkebunan	
	Perkebunan Daerah	700.000
	Perkebunan Swasta	350.000
	<b><i>Luas Wilayah Desa Keseluruhan</i></b>	<b><i>1,578.584</i></b>

Sumber: Dokumentasi Desa Kemiri

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa dari luas wilayah keseluruhan yang mencapai 1,578.584 Ha sebagian besar luas wilayah Desa Kemiri dimanfaatkan untuk perkebunan yaitu perkebunan daerah yang luasnya mencapai 700,000 Ha dan perkebunan swasta yang luasnya mencapai 350.000 Ha dari total luas keseluruhan. Urutan kedua dalam hal pemanfaatan lahan juga digunakan untuk sawah pertanian meliputi irigasi teknis yang luasnya mencapai 262,700 Ha, irigasi tadah hujan yang luasnya mencapai 5,494 Ha, irigasi desa yang luasnya mencapai 22,390 Ha, dengan jumlah keseluruhan yaitu 17,17 lahan digunakan untuk pemukiman dan pekarangan dengan luas keseluruhannya adalah 142,500 Ha, lahan dan digunakan untuk tegalan dengan luas keseluruhan 94,94 Ha, dan lahan yang digunakan untuk kuburan dengan luas keseluruhan 1,500 Ha.



### 3. Keadaan Penduduk

Desa Kemiri merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Panti yang terbagi dalam enam dusun yaitu Delima, Kantong, Krajan, Codong, Ganci, dan Tenggiling dengan jumlah penduduk 8.607 jiwa yang terdiri dari 4.139 jiwa laki-laki dan 4.468 jiwa perempuan.<sup>60</sup> Berikut ini uraian keadaan penduduk menurut mata pencariannya.

**Tabel 4.2**  
**Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian**

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani	108 Orang
2	Buruh Tani	543 Orang
3	Peternak Sapi/Kambing	257 Orang
4	Buruh Perkebunan	881 Orang
5	Pegawai Negeri/TNI/POLRI	21 Orang
6	Potong Rambut, Salon	23 Orang
7	Service Radio, Tape, Televisi	6 Orang
8	Penjahit	24 Orang
9	Pengemudi Taksi/Jasa Angkutan	86 Orang
10	Tukang Ojek	12 Orang
11	Tukang Batu	56 Orang
12	Tukang Kayu/Mebeler	27 Orang
13	Toko/Perancangan	65 Orang
14	Warung Nasi/Rujak/Bakso dll	17 Orang
15	Pembuat Makanan/Kue-kue	6 Orang
16	Lainnya	Orang
	<b>Jumlah</b>	2.132 Orang

Sumber: Dokumintasi Desa Kemiri

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Kemiri bekerja sebagai buruh yaitu sebagai buruh perkebunan yang mencapai 881 dan buruh tani mencapai angka 543 jiwa.

<sup>60</sup>Ibid.

#### 4. Potensi Desa

Desa Kemiri mempunyai beberapa potensi dan sumber daya alam yang menonjol dan dapat dikembangkan dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi desa yang baik. Berikut potensi dan sumber daya alam Desa Kemiri.<sup>61</sup>

- a. Pertanian (kopi, padi, jagung, sayuran dan lain sebagainya);
- b. Peternakan (sapi, kambing, ayam, dan itik);
- c. Pertambangan (batu kali); dan
- d. Industri (tempe, tahu, mebel, menjahit )

#### 5. Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sejak berdiri pada Tahun 2008 BUMDes Kembang memiliki modal sebesar 50 juta yang berasal dari dana talangan kepala desa dan itu semua sudah dikembalikan kepada kepala desa sedangkan dana yang menjadi modal sampai saat ini hanya tersisa kurang lebih 25 juta.<sup>62</sup> Sedangkan menurut Suryono selaku kepala Desa Kemiri juga menjelaskan bahwa BUMDes memang pada awalnya tidak memiliki modal sehingga kepala desa berinisiatif untuk memberi talangan dan dana tersebut sudah dilunasi oleh BUMDes Kembang Desa Kemiri kecamatan Panti Kabupaten Jember.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Ibid.

<sup>62</sup>Luluk Widyawati, Manajer BUMDes Kembang, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember, 18 September 2017.

<sup>63</sup>Suryono, Kepala Desa Kemiri, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember (Kantor Desa), 14 September 2017.

## 6. Kegiatan Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Kegiatan operasional di BUMDes Kembang Desa Kemiri dilakukan pada hari Senin sampai hari Jum'at dari jam 08.00 sampai dengan jam 13.00 WIB, pada jam operasional tersebut yang selalu berada di kantor BUMDes ialah para pengurus harian yang terdiri dari manajer, sekretaris dan bendahara. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk melayani para anggota yang ingin membayar tagihan air, listrik, BPJS dan lain-lain.<sup>64</sup>

Sedangkan pada hari Minggu dan Rabu kepala unit pasar desa pergi ke pasar Desa Kemiri untuk menagih uang redistribusi. Sedangkan Bendahara BUMDes atau kepala unit HIPPAM pada setiap tanggal 20 akhir bulan petugas HIPPAM juga mengecek meteran sebagai acuan tagihan air yang telah digunakan oleh masyarakat.<sup>65</sup>



---

<sup>64</sup>Luluk widyawati, Manajer BUMDes Kembang, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember, 18 September 2017.

<sup>65</sup>Astro Prasetyo, bendahara BUMDes Kembang, *wawancara*, Kemiri Panti Jember (BUMDes Kembang), 18 September 2017.

## 7. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang**  
**Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember**



Sumber: Dokumentasi BUMDes Kembang

### B. Penyajian Data dan Analisis

Proses lanjutan dari skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama penelitian. Setelah melakukan proses pengumpulan data di lapangan, sehingga dirasa cukup dan penelitian bisa di hentikan. Data-data yang merupakan hasil dari penelitian yang telah disesuaikan dengan alat-alat

pengumpul data, kemudian dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh selama penelitian.

Data-data yang diperoleh akan disajikan dan dianalisis sebagai berikut:

## 1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kemiri Kec.

### Panti Kab. Jember

Dalam menjalankan aktivitas BUMDes Kembang Kepala Desa Kemiri beserta BPD dan perangkat desa mengangkat pengurus BUMDes guna menjalankan aktivitas sesuai dengan fungsi dan tujuan yang tertuang dalam AD/ART desa Kemiri. Pengangkatan pengurus BUMDes Kembang juga dituangkan dalam Perdes No. 03 Tahun 2007 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kemiri Kecamatan Panti Kab. Jember serta dengan keputusan kepala desa Kemiri Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang pengangkatan pengelola BUMDes desa Kemiri dengan susunan sebagai berikut.<sup>66</sup>

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a. Dewan Komisaris                        | : Hadi Wiyono     |
| b. Manajer                                | : Luluk Widyawati |
| c. Sekretaris                             | : Moch. Eksan     |
| d. Bendahara                              | : Asro Prasetyo   |
| Koordinator Unit                          |                   |
| a. Kepala Unit Pasar                      | : Guswanto        |
| b. Kepala Unit HIPAM                      | : Asro Prasetyo   |
| c. Pertokoan, Perdagangan Hasil Pertanian | : Abdullah        |

---

<sup>66</sup>Profil BUMDes.

- d. Kepala Unit Kantor Pos Desa : Dwi Fatmawati
- e. Kepala Unit Ekonomi Kreatif : Moch. Eksan

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada kepala desa, Bapak Suryono dan Ibu Luluk memperoleh data-data sebagai berikut:

“Pengangkatan, pengurus itu dirapatkan dengan BPD, setelah itu di tuangkan ke dalam Perdes, biar lebih jelas sampean liat saja di Perdes itu kan sudah ada di buk Luluk itu. Sedangkan untuk jabatannya masih ada yang dirangkap, karena mengawasi beban kerjanya yang masih bisa dirangkap, nanti kalau BUMDesnya sudah maju ya akan ditambah pengurusnya.<sup>67</sup> Pengangkatan pengurus itu dilakukan oleh pak kades dek, dan juga dibentuk AD/ART sebagai panduan kami untuk menjalan kegiatan BUMDes”<sup>68</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Astro selaku bendahara BUMDes dan kepala unit HIPAM mengatakan bahwa:

“Iya gak ada beban kok dek, karena tugas HIPAM hanya menjaga kelancaran air, mengecek meteran dan menagih uang retribusi, sedangkan bendahara hanya merekap saja setiap bulan, sehingga gak terlalu berat kog meskipun merangkap jabatan.”<sup>69</sup>

Dapat dijelaskan dari hasil wawancara di atas bahwa pengelola BUMDes Kembang Desa Kemiri terdiri dari beberapa bagian yang menangani pada bidang masing-masing, mulai dari badan pengawas sampai kepala unit usaha-usaha BUMDes. Dalam program kerjanya sebagian pengurus ada yang merangkap jabatan, seperti bapak Eksan yang menjabat sebagai sekretaris dan kepala unit ekonomi kreatif, sedangkan bapak Astro Prasetyo menjabat sebagai bendahara dan kepala unti HIPAM. Hal ini

<sup>67</sup>Suryono, Kepala Desa, *Wawancara*, Kemiri Panti (Kantor Desa) 14 September 2017

<sup>68</sup>Luluk Widyawati, Manajer BUMDes, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember,(BUMDes Kembang), 04 Oktober 2017.

<sup>69</sup>Astro Prasetyo, Bendahara dan Kepala Unit HIPAM, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember (BUMDes Kembang), 04 Oktober 2017.

dilakukan karena masih sedikitnya unit dan tugas yang ada di BUMDes sehingga sebagian pengurus masih sanggup menjalankan dan mengelola BUMDes Kembang sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu berdasarkan penelitian di BUMDes Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember tentang penerapan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes adalah:

a. Korporatif

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember memperoleh data-data sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Ibu Luluk selaku Manajer BUMDes, mengatakan bahwa:

“Kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes sendiri itu dengan BRI dibidang pengiriman uang atau pengambilan uang, dengan BNI untuk penyaluran bantuan sosial seperti PKH, BLT dan lain-lain, dan kerja sama dengan Pos Indonesia itu dibidang pengiriman barang, pembayaran listrik, setoran tagihan sepeda dan pembayaran BPJS ketenagakerjaan. Itu semua kita kerja sama dalam bentuk MOU. Hal ini dilakukan untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan dalam pengembangan usaha kita juga kerja sama dengan masyarakat seperti usaha di pasar, pengembangan ekonomi kreatif dalam bidang bubuk kopi dengan bajongan dan usaha-usaha lainnya. Ini dilakukan supaya masyarakat juga bisa terlibat dan dapat metik manfaat dari adanya BUMDes.”<sup>70</sup>

Hal senada juga disampaikan Bapak Hadi wiyono selaku Badan

Pengawas BUMDes mengatakan bahwa:

<sup>70</sup>Luluk Widyawati, Manajer BUMDes, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember (BUMDes Kembang), 04 Oktober 2017.

“Kerja sama terkait pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes sendiri tentunya ya pasti ada, contohnya kerja sama dengan BNI, BRI dan pos Indonesia, itu dilakukan demi memberi kemudahan bagi pelayanan terhadap masyarakat Kemiri. Sedangkan kerja sama dengan masyarakat ini sebagian juga ada. Contohnya ekonomi kreatif itu kan untuk menampung/menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sehingga kehidupan masyarakat itu menjadi lebih baik.”<sup>71</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatannya BUMDes Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember melibatkan semua komponen terkait untuk mengembangkan dan memajukan usaha yang ada di BUMDes Kembang Desa Kemiri. Adanya keterkaitan dengan instansi-instansi dan masyarakat dalam pengembangan untuk memajukan usaha – usaha yang dilakukan oleh BUMDes tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan bagi BUMDes Kembang sendiri.

#### b. Partisipatif

Hasil wawancara dengan Ibu Luluk selaku manajer BUMDes mengatakan bahwa:

“Partisipasi terkait pengembangan BUMDes pastinya ada. ini sudah dilakukan oleh pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa untuk mensosialisasikan terkait keberadaan dan usaha – usaha yang dilakukan oleh BUMDes kemasyarakat Kemiri. Supaya semua yang ada di Desa Kemiri bisa ikut terlibat atau berpartisipasi untuk pengembangan BUMDes dek.”<sup>72</sup>

Hal senada juga disampaikan Moh. Falsafah selaku Sekdes desa mengatakan bahwa:

<sup>71</sup>Hadi Wiyono, Badan Pengawas BUMDes dan Wakil BPD Desa Kemiri, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember, 25 Oktober 2017.

<sup>72</sup>Luluk Widyawati, Manajer BUMDes, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember (BUMDes Kembang), 04 Oktober 2017.



“Dalam kegiatan BUMDes memang kita semua harus terlibat karena BUMDes ini kan memang untuk kemajuan desa jadi baik pengurus BUMDes, perangkat desa dan masyarakat memang dilibatkan supaya berpartisipasi untuk kemajuan desa kemiri. Contohnya saja kayak penjual sayur dan penjual bajongan, penjual bakso atau petani kopi itu dikutkan keekonomi kreatif untuk dikembangkan oleh BUMDes supaya kehidauapan masyarakat ini semakin lebih baik.”<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara di atas, bahwanya prinsip partisipatif juga diterapkan di BUMDes Kembang dalam rangka melibatkan semua pihak baik dari kalangan pemerintah desa atau masyarakat.

c. Emansipatif

Hasil wawancara dengan Ibu Luluk selaku manajer BUMDes mengatakan bahwa:

“Semua masyarakat yang ada di Desa Kemiri diperlakukan sama. BUMDes tidak pilih-pilih baik masyarakat dari kalangan pemerintah desa ataupun dari kalangan masyarakat biasa kita perlakukan sama. Baik dari segi pelayanan atau ada usaha-usaha yang ingin dikembangkan jika itu memang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya kita ajak semua untuk berpartisipasi. Artinya semua harus diperlakukan adil dan tidak memilih dari kalangan apapun.”<sup>74</sup>

Serta hasil wawancara dengan Bapak Hadi Wiyono selaku badan pengawas BUMDes dan wakil BPD Desa Kemiri mengatakan bahwa:

“Kalau masalah keadilan dan perlakuan terhadap masyarakat atau kalangan manapun yang dilakukan BUMDes tidak memandang siapapun, semua diperlakukan sama. Karena BUMDes sendiri memang diperuntukkan masyarakat sebagai wadah untuk menampung dan mengembangkan ekonomi masyarakat Desa Kemiri. Jadi, memang seharusnya itu

<sup>73</sup>Moh. Falsafah, Sekdes Kemiri, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember, 25 Oktober 2017.

<sup>74</sup>Luluk Widyawati, Manajer BUMDes, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember,(BUMDes Kembang), 25 Oktober 2017.

dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pada BUMDes.”<sup>75</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Alfia dan Ibu Saiful mengatakan bahwa:

“Kalau mengenai pelayanan dan perlakuan yang diberikan BUMDes ya semua sama. Karena ketika saya membayar listrik atau uang tagihan air selalu dilayani dengan baik.<sup>76</sup> Semua memang harus diperlakukan sama/adil dan saya melihat yang ada di BUMDes semua sama. Contohnya saja ketika saya berjualan di pasar desa ini diperlakukan sama semua. Baik dari segi pungutan retribusi maupun bantuan-bantuan.”<sup>77</sup>

Jadi, menurut pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya BUMDes Kembang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip emansifatif dengan tidak memandang siapapun di perlakukan sama atau adil.

#### d. Transparan

Hasil wawancara dengan Bapak Suryono selaku Kepala Desa Kemiri mengatakan bahwa:

“Mengenai transparansi atau keterbukaan memang harus dilakukan, makanya setiap bulan pengurus BUMDes saya minta untuk melapor ke saya. Baik dari segi keuangan maupun usaha yang dilakukan dan permasalahkn yang ada harus dilaporkan. Terkadang setiap minggu saya pantau karena ini merupakan tugas saya sebagai kepala desa harus memantau bagaimana perkembangan yang ada di Desa Kemiri termasuk BUMDes. Karena pak Kades sebagai lidert atau penggerak harus siap untuk memantau dan memajukan desanya.”<sup>78</sup>

<sup>75</sup>Hadi Wiyono, Badan Pengawas BUMDes dan Wakil BPD Desa Kemiri, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember, 25Oktober 2017.

<sup>76</sup>Alfia, *Wawancara*, Kemiri Panti, 18 Oktober 2017.

<sup>77</sup>Syaiful, *Wawancara*, Kemiri Panti, 18 Oktober 2017.

<sup>78</sup>Suryono, Kepala Desa Kemiri, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember (Kantor Desa), 23 Oktober 2017.

Senada dengan Ibu Luluk selaku manajer BUMDes mengatakan

bahwa:

“Mengenai transparansi juga pasti ada, selaku pengurus kami selalu melakukan transparansi atau terbuka pada siapaun. Karena pengurus juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan keadaan BUMDes, baik dari keuangan, usaha dan permasalahan kita sampaikan ke Pak Kedes, Badan pengawas yang memang menjadi harus tau tentang keadaan BUMDes dan terkadang juga juga pihak yang ingin tau keadaan BUMDes ya kita sampaikan secara terbuka kog.”<sup>79</sup>

Serta Bapak Hadi Wiyono mengatakan bahwa:

“Transpransi yang dilakukan BUMDes itu rutin setiap bulan. Setiap bulan mereka harus melaporkan ke Pak Kades, karena sebagai keterbukaan. Terkadang kalau saya mau melihat laporannya keuangannya pengurus sudah selalu siap. Karena saya sendiri sebagai badan pengawas juga kurang aktif karena adanya kesibukan. Tapi setiap kali saya tanyakan mengenai laporannya pengurus sudah selalu siap.”<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan BUMDes Kembang juga melaksanakan secara transparansi dengan adanya laporan secara rutin kepada kepala desa yang juga disampaikan ketika ada musyawarah desa dan mengenai keuangan atau hal lain juga bisa dilihat bagi masyarakat atau pihak peneliti yang memang ingin tahu mengenai keadaan BUMDes.

#### e. Akuntabel

Hasil wawancara dengan Bapak Guswanto selaku kepala unit pasar desa mengatakan bahwa:

<sup>79</sup>Luluk Widyawati, Manajer BUMDes, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember (BUMDes Kembang), 04 Oktober 2017.

<sup>80</sup>Hadi Wiyono, Badan Pengawas BUMDes dan Wakil BPD Desa Kemiri, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember, 25 Oktober 2017.

“Untuk pertanggungjawabannya, saya selaku kepala unit pasar desa, ya bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur kegiatan di pasar setiap minggunya sekaligus menarik retribusi terhadap para pedagaang dan menyetorkannya pada bendahara yaitu pak Astro selaku bendahara BUMDes. Bagitu pula dengan kepala unit usaha yang lain juga menyetorkan pendapatannay ke bendahara.”<sup>81</sup>

Senada dengan Ibu Luluk selaku manajer BUMDes mengatakan

bahwa:

“Untuk pertanggungjawaban kami selaku pengurus setiap bulan dengan kepala desa. Tapi sebelum itu kita rapat internal dulu sebelum melaporakan ke pak kades. Pengurus melaporkan mengenai keuangan, hasil usaha-usaha dan menyampaikan permasalahan yang kami hadapi. Kareana laporan pengurus itu juga disampaikan di musyawarah desa (Musdes).”<sup>82</sup>

Serta Bapak Falsafah selaku sekretaris desa mengatakan bahwa:

“Kalau BUMDes sendiri pertanggungjawabannya memang dari pengurus ke pak kades dulu, baru nanti pak kades juga menyampaikan di musyawarah desa. Karena ketika ada musdes semuanya di undang baik dari pengurus BUMDes, pemerintah desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat juga ikut hadir untuk memberi masukan-masukan terhadap pemerintah maupun BUMDes itu sendiri. Jadi, semua masayakat tahu ketika ada pertanggungjawaban mengenai BUMDes.”<sup>83</sup>

Jadi menurut hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwasanya BUMDes Kembang dalam pengelolaannya menerapkan prinsip akuntabel yaitu dengan pertanggungjawaban masing-masing unit usaha yang melaporkan ke bendahara dan manajer, setelah itu

<sup>81</sup>Guswanto, Kepala Unit Pasar Desa, *Wawancara*, Kemiri Panti (Pasar Desa), 18 Oktober 2017.

<sup>82</sup>Luluk Widyawati, Manajer BUMDes, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember,(BUMDes Kembang), 04 Oktober 2017.

<sup>83</sup>Moh. Falsafah, Sekdes Kemiri, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember (Kantor Desa), 25 Oktober 2017.

pengurus juga melaporkan ke kepala desa sehingga juga disampaikan ketika Musdes (musyawarah desa).

f. Subtaintabel

Hasil wawancara dengan Bapak Eksan selaku sekretaris BUMDes dan kepala unit ekonomi kreatif, mengatakan bahwa:

“Dalam pengembangan usaha BUMDes Kembang ya masih tetap mempertahankan dan menjalankan usaha yang sudah ada seperti pasar dan HIPPAM, dan menambah usaha baru untuk meningkatkan pelayanan yang ada di Desa Kemiri yaitu dengan adanya kantor pos desa. Sedangkan untuk mengembangkan usaha dan potensi yang ada desa kami sudah siapkan ekonomi kreatif sebagai wadah untuk menampung usaha kecil seperti bajongan, penjual bakso dan penjual kopi kita beri pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya.”<sup>84</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Rusyati mengatakan bahwa:

“Saya jualan sayur sudah lama. Saya jualan disekitar Desa Kemiri. Saya ikut juga ke BUMDes untuk mendaftara BPJS ketenagakerjaan dan ketika butuh modal untuk mengembangkan usaha ya saya pinjamnya ke BUMDes. Karena disini tidak ada bunga. Kalau pinjam satu juga ya setiap bulannya nyetor seratus sampai itu lunas semua.”<sup>85</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes juga menerapkan subtaintabel dengan cara menjalankan usaha yang sudah ada dan membuat usaha baru untuk menopang pelayanan yang ada di Desa Kemiri. Sedangkan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat BUMDes bekerja sama dengan para pengusaha kecil dalam wadah ekonomi kreatif.

<sup>84</sup>Moch. Eksan, Sekretaris dan Kepala Unit Ekonomi Kreatif, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember (BUMDes Kembang), 09 Oktober 2017.

<sup>85</sup>Rusyati, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember, 18 Oktober 2017.

## 2. Jenis-Jenis Usaha yang di miliki BUMDes

### a. Pasar Desa

Pasar desa merupakan salah jenis usaha yang pengelolaannya dikembangkan oleh BUMDes Kembang. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa Kemiri dan di kelola oleh badan usaha milik desa (BUMDes) Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di pasar desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember memperoleh data-data sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Guswanto selaku kepala unit Pasar, mengatakan bahwa:

“Pasar Desa Kemiri ini merupakan salah satu jenis usaha yang juga dikelola BUMDes, yang peruntukkan untuk semua masyarakat yang mau jualan disini baik dari desa sini maupun dari luar. Setiap minggunya buka dua kali dek,yakni pada hari rabu dan minggu, sedangkan kalau hari senin itu yang buka pasar Desa Mencek dan hari selasa itu waktunya Desa Suci..”<sup>86</sup>

Hal senada juga di jelaskan oleh Ibu Husnia pedagang konveksi, mengatakan bahwa:

“Saya jualan disisni sudah lama sekitar lebih 17 Tahun dek, saya aslinya bukan orang sini tapi asli daerah Kelurahan Sempusari. Saya jualan konveksi disisni seperti pakaian, sandal dan lain-lain. Kalau waktu jualannya ya setiap hari rabu dan minggu kalau hari senin dan kamis di Desa Mencek sedangkan kalau selasa dan sabtu ya di Desa Suci.”<sup>87</sup>

<sup>86</sup>Guswanto, Kepala Unit Pasar Desa, *Wawancara*, Kemiri Panti (Pasar Desa), 18 Oktober 2017.

<sup>87</sup>Husnia, Pedagang Konveksi, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember (Pasar Desa), 18 Oktober 2017.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pasar desa merupakan salah satu aset desa yang bertujuan memberikan fasilitas bagi masyarakat desa kemiri dalam menjalankan roda perekonomian, baik bagi masyarakat kecil maupun menengah, dengan menyediakan sarana berupa bangunan los pasar, lapak pedagang, tempat parkir pengunjung/pembeli pasar, listrik dengan mengelola iuran dan retribusi bagi pedagang sebagai pemasukan yang nantinya akan di kembalikan kepada masyarakat yang nantinya akan dikembalikan kepada pelayanan fasilitas pasar desa.

Dengan diadakannya kegiatan pasar desa setiap minggu dua kali akan memberikan keluangan pada para pedagang untuk menjual barang dagangannya di desa lain yaitu di Desa Mencek dan Desa Suci. Selain itu dengan adanya penjualan dihari minggu juga dapat memberikan waktu senggang atau libur dan memberikan keleluasaan bagi para masyarakat yang bekerja di tempat-tempat yang mengikat seperti perkebunan dan perkantoran.

Selain itu dalam kegiatan pasar juga ada penarikan uang retribusi bagi setiap pedagang yang berjualan di Desa Kemiri. Sesuai hasil wawancara dengan Guswanto dan Astro mengatakan bahwa:

“Mengenai uang karcis kita menarik setiap pedagang sebesar Rp 1000. Namun dulu sebelum dibangun los-los ini, uang karcis hanya Rp 500,00 namun semenjak ada perbaikan bangunan maka uang karcisnya juga di naikkan menjadi Rp 1000,00/pedagang. Hal ini dilakukan sebagai jaga-jaga apabila ada kerusakan dipasar. untuk pendapatan dari usaha pasar sendiri ya tidak tentu dek, tergantung dari orang berjualan, sehingga pendapatannya kadang Rp. 500.000 sampai Rp

1000.000 setiap bulannya.<sup>88</sup> Pada awalnya uang karcis pedagang di pasar desa ini hanya Rp 500, itu ketika los-los yang ada masih belum dibangun. Namun hanya ketika sudah mengalami perbaikan maka uang rebusinya juga di naikan.<sup>89</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan pasar desa bertujuan untuk memberikan fasilitas dan layanan kepada masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja masyarakat dengan memasarkan hasil pertanian dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Kemiri. Selain itu dengan adanya retribusi bagi setiap pedagang sebesar Rp 1000 juga dapat memberikan pendapatan bagi BUMDes yang mencapai Rp 500.000 sampai Rp. 1000.000 setiap bulan, tentu hal akan sangat membantu BUMDes dalam menjalankan operasional dan untuk perbaikan alat-alat pasar dan lain-lain.

Selain itu, pasar desa juga dapat memberi dampak yang positif bagi masyarakat karena dapat menghasilkan rezeki dengan memperdagangkan barang dagangannya dari hasil pertanian, meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan maupun kebutuhan primer lainnya.

#### **b. HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum)**

HIPPAM merupakan salah satu jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya alam Desa

<sup>88</sup>Guswanto, Kepala Unit Pasar Desa, *Wawancara*, Kemiri Panti (Pasar Desa), 25 Oktober 2017.

<sup>89</sup>Astro Prasetyo, Bendahara dan Kepala Unit HIPPAM, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember (BUMDes Kembang), 09 Oktober 2017.



Kemiri. HIPPAM dibentuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Kemiri, baik untuk untuk minum maupun kebutuhan MCK. Dengan adanya HIPPAM ini masyarakat desa Kemiri dapat bisa menggunakan air minum bersih secara merata. Saat ini pengelolaan air minum bersih di desa Kemiri mampu memenuhi kebutuhan air minum secara menyeluruh.

Masyarakat yang ingin menjadi anggota HIPPAM cukup dengan mendaftar dan membeli semua kebutuhan saluran air yang menyambungkan dengan pipa saluran yang sudah ada. Sampai saat ini pemakai air bersih di Desa Kemiri mencapai 532 anggota. Setiap anggota HIPPAM diwajibkan untuk membayar retribusi sesuai dengan meteran yang ada di saluran pipa. Terkait dengan retribusi HIPPAM, BUMDes menarik uang retribusi sebesar Rp 700/m dan retribusi beban sebesar Rp. 4000. Pembayaran retribusi HIPPAM dilakukan setiap tanggal satu sampai tanggal sepuluh awal bulan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Luluk selaku manajer BUMDes mengatakan bahwa:

“Saat ini anggota HIPPAM mencapai 532, biaya permeternya Rp 700 biaya bebannya Rp 4000 perbulan, itu bayarnya ya setiap tanggal satu sampai sepuluh awal bulan. Sehingga perbulan pendapatan HIPPAM bisa mencapai 6 juta dek.”<sup>90</sup>

Senada dengan apa yang dijelaskan bapak Astro selaku bendahara BUMDes mengatakan bahwa:

<sup>90</sup>Luluk Widyawati, Manajer BUMDes, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember (BUMDes Kembang), 09 Oktober 2017.

“Setiap bulannya anggota HIPPAM itu bayar Rp 700 permeternya dan biaya beban Rp 4000. Dengan cara ditagih kerumah-rumah dan ada sebagian yang langsung bayar disini (kantor BUMDes). Untuk pendapatan HIPPA, mencapai 6 jutaan itu wes tiap bulan. Tergantung pada pemakaian airnya dek”<sup>91</sup>

Adanya pendapatan dari HIPPAM yang mencapai 6 juta tentunya juga sangat membantu terhadap kegiatan operasional dan memberi pemasukan terhadap keuangan BUMDes. Sedangkan bagi masyarakat Desa Kemiri, HIPPAM merupakan kebutuhan utama, karena masyarakat sangat bergantung pada HIPPAM dalam memenuhi kebutuhannya, dengan adanya HIPPAM masyarakat sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan air setiap harinya, sehingga pengurus BUMDes selalu waspada terhadap sesuatu yang mengganggu kelancaran saluran air tersebut. Dengan demikian untuk menjaga kelancaran air minum, pengurus BUMDes selalu berjaga-jaga dan siap memperbaiki setiap terjadi kerusakan pada saluran pipa yang atau tendon penampungan air yang rusak. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Aziz mengatakan bahwa:

“Untuk memenuhi kebutuhan air disini ya kebanyakan pakek HIPPAM itu dek, kalau ada kerusakan ya selalu langsung diperbaiki oleh pak astro atau pak eksan itu. Sehingga air disini ya lancar.”<sup>92</sup>

Dari hasil observasi dan kesimpulan diatas, HIPPAM merupakan unit usaha yang daapt memberikan pemasukan terhadap kas BUMDes. Selain itu HIPPAM juga dapat memenuhi kebutuhan

<sup>91</sup>Astro Prasetyo, Bendahara dan Kepala Unit HIPPAM, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember (BUMDes Kembang), 09 Oktober 2017.

<sup>92</sup>Bu Aziz, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember, 13 Oktober 2017.

air bersih yang ada di Desa Kemiri dengan uang retribusi yang sangat murah setiap bulannya.

Usaha HIPPAM merupakan kegiatan usaha yang paling menjanjikan dan dapat memberikan pendapatan bagi BUMDes, sehingga kegiatan operasional BUMDes juga dapat berjalan dengan lancar dalam sehari-harinya.

### c. Pos Desa

Pos Desa merupakan jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes Kembang yang berjalan mulai tahun 2016. Dalam pelaksanaannya pos desa bermitra dengan Pos Indonesia cabang Jember dan Bank BNI guna memudahkan masyarakat dalam melayani jasa. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Luluk selaku manajer BUMDes mengatakan bahwa:

“Iya dek salah satu jenis usaha yang ada di BUMDes juga pos desa yang melayani jasa SOPP Online melayani pembayaran listrik, pembayaran angsuran sepeda motor, jasa pengiriman surat, barang dan uang bagi yang berada jauh itu. Selain itu dengan adanya pos desa ini juga masyarakat yang mendapat PKH, BLT dan bantuan sosial lainnya sekarang juga sudah tidak perlu jauh-jauh mengambil di kecamatan atau kemana, cukup disini saja. untuk pendapatan sendiri di pos desa yang paling banyak ya dari rekening listrik, karena bayarnya setiap bulan, jadi bisa mencapai Rp 250.000.”<sup>93</sup>

Senada dengan Bapak Eksan selaku Sekretaris BUMDes mengatakan bahwa:

“Dengan adanya pos desa ini masyarakat sini menurut saya sudah enak dek, karena jika perlu apa-apa sudah tidak perlu

<sup>93</sup>Luluk Widyawati, Manajer BUMDes, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember, (BUMDes Kembang), 09 Oktober 2017.

jauh-jauh. Contohnya kayak keluarganya yang merantau jika ingin mengirim uang cukup dikirim kesini saja. Jadi tidak jauh keluarganya yang mau mengambil uang kirimannya. Begitu juga dengan warga yang mengambil kreditan sepeda motor juga gak usah jauh-jauh juga, bisa bayar di pos desa juga.”<sup>94</sup>

Serta Ibu Nur juga mengatakan bahwa:

“Sekarang masyarakat sini sudah enak dek, apa-apa sudah tidak perlu pergi kemana-kemana cukup di pos desa. Kayak yang dapat BLT dan PKH itu sudah gak usah ke kecamatan lagi cukup ngambil dikantor pos desa.”<sup>95</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kantor pos desa juga memberi pemasukan pendapatan yang mencapai Rp. 250.000 setiap bulan. Selain itu, adanya kantor pos desa dapat meningkatkan pelayanan atas kebutuhan dibidang pengiriman atau pelayanan jasa lainnya. Dengan adanya pos desa masyarakat Desa Kemiri tidak harus jauh-jauh mengambil dana bantuan sosial seperti PKH, BLT dan lain-lain.

#### **d. Ekonomi Kreatif**

Ekonomi kreatif merupakan salah satu bidang usaha yang bergerak dalam bidang usaha untuk mencari peluang dan terobosan yang dalam hal ini BUMDes Kembang memberikan stimultan dan peluang kepada masyarakat baik sekala kecil maupun besar. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang

<sup>94</sup>Moch. Eksan, Sekretaris dan Kepala Unit Ekonomi Kreatif, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember, (BUMDes Kembang), 09 Oktober 2017.

<sup>95</sup>Nur, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember, 13 Oktober 2017.

telah ada. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Suryono selaku kepala desa mengatakan bahwa:

“Ekonomi kreatif ini merupakan program yang bergerak dibidang sumber daya manusia, karena sasaran dari ekonomi kreatif ini kan para masyarakat yang tak mampu dan tidak punya kerjaan bisa berjualan kecil-kecil. Selain itu juga mengembangkan para penjual kecil yang sudah ada. Seperti penjual sayuran/bajongan, penjual bakso dan penjual cilok. Mereka di kembangkan dan didaftarkan BPJS ketenaga kerjaan juga.”<sup>96</sup>

Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Eksan selaku kepala unit ekonomi kreatif mengatakan bahwa:

“Untuk ekonomi kreatif ini adalah program BUMDes yang bergerak pada bidang pengembangan sumber daya manusia dan mengoptimalan kegiatan ekonomi masyarakat yang sudah ada. Selain itu juga untuk mengakomodir kelompok usaha kecil yakni usaha pedagang kecil seperti bajongan/sayur dan pedagang bakso keliling. Selain itu, untuk menjamin keselamatannya mereka juga di ikut sertakan program BPJS ketenagan kerjaan dek. Untuk pendapatan sendiri itu tidak ada, karena unit ekonomi kreatif ini hanya sebagai wadah untuk mengembangkan potensi sumber daya”<sup>97</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya ekonomi kreatif dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran masyarakat Desa Kemiri. Serta dapat menjadi wadah bagi para pedagang kecil seperti bajongan/penjual sayur, penjual bakso untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kemiri. Dengan adanya program BPJS masyarakat juga menjadi terjamin akan adanya jaminan

<sup>96</sup>Suryono, Kepala Desa Kemiri, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember (Kantor Desa), 23 Oktober 2017.

<sup>97</sup>Moch. Eksan, Sekretaris dan Kepala Unit Ekonomi Kreatif, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember, (BUMDes Kembang), 09 Oktober 2017.

kesehatan jika terjadi sesuatu atau kecelakaan pada para penjual atau anggota ekonomi kreatif. Meskipun dalam kegiatannya unit ekonomi kreatif tidak memberi pemasukan terhadap keuangan BUMDes tentunya kegiatan ini menjadi sesuatu yang positif untuk menampung dan mendorong potensi ekonomi yang ada di Desa Kemiri.

**e. Pertokoan, Perdagangan Hasil Pertanian**

Pertokoan, perdagangan hasil pertanian merupakan salah satu jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes Kembang yang bergerak dibidang penjualan pupuk dan kebutuhan pertanian. Namun sejak awal tahun 2016 sudah tidak berjalan karena pada perkembangannya pertokoan hasil pertanian yang kurang efektif dan mengganggu pertokoan yang ada di desa kemiri sehingga kepala desa mengintruksikan kepada BUMDes untuk tidak menjalankan jenis usaha ini. Hal ini dilakukan agar penjualan bisa dilakukan oleh toko-toko yang ada di desa kemiri dan masyarakat desa kemiri juga bisa membeli pada toko-toko tersebut. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu Luluk selaku manajer BUMDes mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini jenis usaha pertokoan, perdagangan hasil pertanian itu sudah difakumkan oleh pak kades, hal ini dilakukan supaya masyarakat bisa membeli pada toko-toko yang ada di desa kemiri, karena jika masyarakat membeli di BUMDes semua kan toko-toko yang lain mau dijual dimana dan mau hasil dari pendapatannya dek. Makanya sama pak kades usaha ini diberhentikan.”<sup>98</sup>

<sup>98</sup>Luluk Widyawati, Manajer BUMDes, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember, (BUMDes Kembang), 09 Oktober 2017.

Senada dengan Abdullah selaku kepala unit pertokoan, pertokoan hasil pertanian mengatakan bahwa:

“Iya untuk saat ini, unit usaha pertokoan, perdagangan hasil pertanian ini difakumkan oleh oleh kepala desa. Untuk alasannya saya kurang faham. Untuk lebih jelasnya coba sampean tanya ke bu Luluk atau pak kades dek.”<sup>99</sup>

Dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertokoan perdagangan hasil pertanian dapat berpengaruh terhadap penjualan pupuk dan kebutuhan pertanian yang di jual oleh toko-toko yang ada di Desa Kemiri. Hal ini tentu akan menambah persaingan antara penjualan masyarakat dengan usaha yang yang dijalankan oleh BUMDes. Sehingga jika unit usaha pertokoan perdagangan hasil pertanian terus berlanjut maka ini akan berpengaruh terhadap pendapatan pertokoan yang lain. Maka dari itu kepala desa kemiri memutuskan untuk memfakumkan unit usaha tersebut.

Secara keseluruhan bidang-bidang usaha yang dikembangkan oleh BUMDes merupakan terobosan dibidang ekonomi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan etika dalam pengelolaan potensi dan aset desa. Oleh karena itu, tidak hanya untuk mengurangi jumlah penganggungan dan urbanisasi, BUMDes merupakan upaya dalam mewadahi kegiatan ekonomi yang dapat memunculkan bentuk-bentuk ekonomi kreatif dan dapat memberikan

---

<sup>99</sup>Abdullah, Kepala unit Pertokoan Perdagangan Hasil Pertanian, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember (BUMDes Kembang), 09 Oktober 2017.

pelayanan publik bagi masyarakat sesuai perkembangan zaman yang semakin modern.

Selain itu, untuk melihat pendapatan BUMDes Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember dapat di lihat pada tabel di bawah ini.<sup>100</sup>

**Tabel 4.3**  
**Pendapatan BUMDes Kembang**

Tahun	Bidang Usaha			Jumlah
	Pasar Desa	HIPPAM	Fee Listrik	
2012	7.545.000	29.583.000	688.000	37.816.000
2013	7.392.000	27.802.000	647.000	35.841.000
2014	6.919.000	62.432.000	591.000	69.942.000
2015	12.212.000	72.063.000	549.000	84.824.000
2016	12.030.000	73.394.000	576.000	86.000.000

Sumber: Dokumentasi Neraca Keuangan BUMDes Kembang

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan terbesar dihasilkan oleh bidang usaha HIPPAM, yang pendapatan terbesar terjadi pada tahun 2016 sedangkan pendapatan terendah dihasilkan oleh bidang usaha pos desa (fee listrik ) yang mengalami pendapatan terendah pada tahun 2015. Dengan demikian, BUMDes Kembang terus mengalami kenaikan mulai tahun 2014 pada sektor usaha yang dijalankan. Sehingga dengan pendapatan ini, BUMDes Kembang mampu untuk membiayai kebutuhan operasional dan gaji pegawai BUMDes.

<sup>100</sup> Buku Neraca Keuangan BUMDes Kembang.



### 3. Kontribusi BUMDes Bagi Pembangunan Ekonomi Desa

Dari hasil obseravsi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di BUMDes Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember memperoleh data-data sebagai berikiti:

Hasil wawancara dengan Bapak Suryono selaku kepala desa, pengawas dan penasehat BUMDes Kembang mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini pendapatan BUMDes masih belum dimasukkan ke PADes, karena pendapatan BUMDes sekarang masih kecil jadi pendapatan dari hasil usaha BUMDes masih dimasukkan pada modal dan pengembangan BUMDes sendiri. Hanya saja kontribusi BUMDes bisa terlihat pada kegiatan sosial, seperti santuan fakir miskin dan anak yatim, khitanan massal dan kegiatan pengajian setiap tahun untuk memperingati tragedi banjir pada tahun 2006. Selain itu BUMDes juga bisa memberikan layanan jasa masyarakat kemiri.”<sup>101</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Luluk, mengatakan bahwa:

“Kontribusi BUMDes sendiri pada saat ini hanya lebih banyak diberikan pada kegiatan sosial, seperti santunan fakir miskin dan anak yatim, khitanan massal dan mengadakan pengajian setiap tahunnya. Untuk PADes sendiri BUMDes belum bisa memberikan apa-apa karena pendapatan dari BUMDes sendiri masih sedikit hanya cukup untuk bayar gaji pegawai dan oprasinal BUMDes dek. Tapi ada juga bantuan berupa simpan pinjam perempuan bagi kelompok yang ingin melakukan usaha minimal dalam 1 kelompok itu ada 5 orang maka mereka bisa pinjem di BUMDes.”<sup>102</sup>

Sedangkan Bapak Hadi Wiyono mengaatakan Bahwa:

“Saya melihat usaha yang dikembangkan oleh BUMDes ini memang ada yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,

<sup>101</sup>Suryono, Kepala Desa Kemiri, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember, (Kantor Desa), 23 Oktober 2017.

<sup>102</sup>Luluk Widyawati, Manajer BUMDes, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember, (BUMDes Kembang), 18 Oktober 2017.

seperti pasar desa yang bisa memberikan lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin menjual hasil pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Selain itu adanya kantor pos desa yang dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat sehingga tidak usah jauh-jauh untuk mengirim atau mengambil uang dan lain sebagainya. Tapi kalau kalau untuk pemasukan terhadap PADes sendiri masih belum ada kontribusi karena memang pendapatan BUMDes masih cukup untuk membayar honor pengurus BUMDes. Hanya saja ada juga bantuan sosial bagi masyarakat Desa Kemiri yang dilakukan oleh BUMDes Kembang.tentu ini menjadi hal positif bagi ekonomi dan pelayanan publik di Desa Kemiri.”<sup>103</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes masih belum bisa memberikan sebuah kontribusi terhadap PADes yang merupakan sumber anggaran dan belanja desa dalam pembangunan dan kegiatan operasional Desa Kemiri. Namun kontribusi BUMDes dapat dilihat dari pelayanan publik yang semakin maju dan terus berkembang dengan mengikuti perkembangan teknologi dan zaman yang semakin modern sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan pembayaran listrik, pembayaran angsuran, pengiriman barang, uang dan lain sebagainya.

Selain itu, adanya kegiatan sosial yang dilakukan oleh BUMDes juga membantu meringankan perekonomian masyarakat Desa Kemiri dan dapat mempererat hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Adanya bantuan berupa pinjaman bagi setiap kelompok perempuan dalam membuka kegiatan usaha juga dapat

---

<sup>103</sup>Hadi Wiyono, Badan Pengawas BUMDes dan Wakil BPD Desa Kemiri, *Wawancara*, Kemiri Panti Jember, 25 Oktober 2017.

memberikan sebuah aktivitas baru bagi kaum perempuan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat kemiri.

### C. Pembahasan Temuan

Dari beberapa data yang di sajikan dan kemudian di analisis, maka hasil tersebut perlu untuk diadakan pembahasan terhadap hasil temuandalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada dan relevan dengan topik penelitian ini, untuk itu pembahasan ini akan disesuaikan dengan sub yang menjadi pokok pembahasan, guna mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Maka disini akan membahas temuan-temuan dilapangan yang meliputi:

#### 1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kemiri Kec. Panti Kab. Jember

Dengan memperhatikan akan pentingnya pengelolaan BUMDes salah satu untuk mengembangkan dan meningkat usaha dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat desa. Maka suatu lembaga BUMDes harus mampu mengetahui lebih dahulu. Pengelolaan BUMDes berdasarkan AD/ART.

Menurut Sukasmanto yang dikutip dari buku rancang bangun bisnis pengelolaan BUMDes mengemukakan setiap organisasi pengelolaan BUMDes terpisah dari pemerintahan desa dan paling sedikit terdiri atas:<sup>104</sup>

- a. Penasehat atau komisaris
- b. Pelaksana operasional atau direksi;

<sup>104</sup>Sukasmanto, *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDes* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPB), 2014), 26.

- 1) Direksi atau manajer; dan
- 2) Kepala unit usaha

Di lihat dari teori dan penjelasan mengenai pengelolaan BUMDes. BUMDes Kembang di desa Kemiri sudah memiliki AD/ART yang menjadi pedoman dalam menjalankan roda kegiatan yang ada di BUMDes Kembang. AD/ART jelas merupakan kebutuhan yang sangat fundamental bagi BUMDes dalam menjalankan dirinya karena aturan-aturan di dalamnya adalah pedoman yang wajib ditaati seluruh proses keorganisasian BUMDes. Kepatuhan sebuah institusi terhadap AD/ART akan sangat berpengaruh terhadap perjalanan sebuah organisasi. Selain menjadi syarat legalitas, AD/ART adalah koridor yang akan memberi arah sebuah organisasi dan bagaimana sebuah organisasi menuju tujuannya. Dengan adanya AD/ART yang dibuat oleh pemerintah Desa Kemiri, BUMDes Kembang memiliki legalitas dan pedoman dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan AD/ART yang ada.

Selain AD/ART, pemerintah Desa Kemiri dalam menjalankan operasioanl BUMDes juga membentuk struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau lembaga dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi.

Dari apa yang disampaikan di atas pada dasarnya struktur BUMDes Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang terdiri dari badan pengawas, manajer, bendahara sekretaris dan kepala unit usaha yang ada BUMDes Kembang sesuai dengan teori.

Sedangkan pada prinsipnya pengelolaan BUMDes memiliki 6 prinsip diantaranya: prinsip korporatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan subtainabel.<sup>105</sup>

Dari penjelasan tentang prinsip-prinsip BUMDes di atas, BUMDes Kembang juga menerapkan prinsip korporatif yaitu dengan melakukan kerja sama dengan pihak instansi lain dan masyarakat, partisipatif: semua pihak-pihak terkait ikut berpartisipasi dalam mendukung untuk memajukan BUMDes Kembang, emansipatif: semua anggota yang terlibat dengan BUMDes di perlakukan sama atau adil, transparansi: keadaan BUMDes Kembang dapat dilihat oleh siapapun, baik dari segi keuangan atau usaha-usaha yang dijalankan, akuntabel: setiap bulan pengurus BUMDes melakukan pembukuan dan melaporkan pada kepala desa untuk di sampaikan pada masyarakat pada saat musyawarah desa, dan subtainabel: melastarikan usaha yang ada dan membuat usaha baru berupa pos desa untuk mendukung pelayanan yang ada di Desa Kemiri serta berusaha mengembangkan usaha kecil yang dimiliki masyarakat Kemiri dalam wadah ekonomi kreatif.

---

<sup>105</sup>Ibid., 27.

## 2. Jenis-Jenis Usaha yang di miliki BUMDes

Menurut Permendesa PDTT Nomor 04 Tahun 2015, Jenis-jenis usaha atau bisnis yang dapat dikembangkan oleh badan usaha milik desa (BUMDes) adalah sebagai berikut:<sup>106</sup>

- a. Usaha sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Usaha ini bersifat usaha ekonomi pelayanan publik yang sifatnya sosial namun bernuansa bisnis kepada masyarakat meskipun kurang memberikan keuntungan secara maksimal. Usaha yang dapat dijalankan seperti: pengelolaan air minum desa, listrik desa, lumbung pangan, usaha-usaha terkait sumber daya lokal dan teknologi tepat guna.
- b. Usaha penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa. Usaha yang dapat dijalankan dalam usaha penyewaan ini meliputi: Alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUMDes; dan barang sewa lainnya.
- c. Usaha perantara (*broking*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. BUMDes dapat berperan sebagai lembaga pemasaran atas produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, krajinan, dan lain-lain dari masyarakat, agar mereka tidak kesulitan dalam memasarkan produk dan komoditas mereka.

---

<sup>106</sup>Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Pustaka, 2015), 586.

- d. Usaha bisnis keuangan (*finansial business*) yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa dengan bunga yang lebih rendah dibanding para rentenir atau bank-bank konvensional, misalnya saja Bank Desa, lembaga keuangan mikro, perkreditan desa dan lain-lain.
- e. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa baik dalam segala lokal desa maupun kawasan perdesan. Misalnya: usaha transportasi desa, kapal desa, desa wisata, pengembangan kerajinan khas desa bersekala menengah dan lain-lain.

Berdasarkan Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015, mengenai jenis-jenis usaha yang dapat dijalankan oleh badan usaha milik desa (BUMDes). BUMDes Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember memiliki lima unit usaha yang di kembangkan. Empat diantaranya masih terus berjalan yaitu pasar desa, HIPPAM, kantor pos desa dan ekonomi kreatif. Sedangkan satu dalam keadaan fakum yakni pertokoan, perdagangan hasil pertanian.

Dari 4 bidang usaha yang masih dijalankan dan dikembangkan oleh BUMDes Kembang Kecamatan Panti Kabupaten Jember menurut peneliti sudah sesuai dengan teori. Namun adanya pemfakuman seperti ini tentunya menjadi sebuah hal yang harus di perbaiki dan dikaji secara matang ketika merencanakan dan menjalankan sebuah usaha agar tidak menyaingi keberadaan toko yang lain sehingga usaha desa tidak

mengambil nasabah serta pendapatan yang dihasilkan oleh toko-toko masyarakat Desa Kemiri.

### 3. Kontribusi BUMDes bagi Pembangunan Ekonomi Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kontribusi adalah sumbangan.<sup>107</sup> Sedangkan dalam bahasa Inggris, kontribusi berasal dari kata *kontribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan.<sup>108</sup> Kontribusi adalah ikut serta ataupun memberikan baik ide, tenaga dan lain sebagainya dalam kegiatan.<sup>109</sup> Adapun yang dimaksud dengan kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan.<sup>110</sup>

Berdasarkan pengertian kontribusi yang dikemukakan di atas maka dapat diartikan bahwa kontribusi BUMDes bagi pembangunan ekonomi desa adalah keterlibatan dan peranan BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Dari hasil temuan peneliti mendapatkan bahwa kontribusi BUMDes bagi pembangunan ekonomi desa ialah (1) menciptakan lapangan pekerjaan (2) memberikan pelayanan jasa (3) Bantuan Sosial.

Pertama, adanya kegiatan usaha yang di kembangkan oleh BUMDes di bidang pasar desa dan ekonomi kreatif memberikan lapangan

<sup>107</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 592.

<sup>108</sup>Anne Akhira, *Terminologi Kosa Kata* ((Jakarta: Aksara, 2012), 77.

<sup>109</sup>Soerjono dan Djoenaesih, *Istilah Komunikasi* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 45.

<sup>110</sup>Gunadi dan Djoni, *Istilah Komunikasi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), 76.



pekerjaan bagi masyarakat Desa Kemiri untuk menjual hasil pertanian, peternakan, industri dan lain sebagainya. Selain itu adanya unit ekonomi kreatif juga menjadi wadah bagi para pengusaha kecil untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha yang dijalani oleh masyarakat kecil. Sehingga adanya usaha ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kemiri dalam meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan hidupnya.

Kedua, pelayanan yang diberikan oleh BIMDes tentunya akan menjadi hal yang positif bagi masyarakat desa, dalam mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju. Dengan adanya pelayanan jasa yang diberikan oleh BUMDes masyarakat tak lagi harus jauh-jauh untuk melakukan transaksi dalam pembayaran listrik, pembayaran pengiriman barang, uang dan lain sebagainya.

Ketiga, dari bidang usaha yang dikelola oleh BUMDes Kembang setiap tahunnya tentu memiliki pendapatan. Pendapatan yang masih tergolong kecil tidak dimasukkan pada pendapatan asli desa (PADes). Namun untuk memberikan sumbangsih pada pembangunan ekonomi desa, BUMDes melakukan kegiatan sosial berupa santunan fakir miskin, anak yatim, hitanan massal dan pengajian dalam memperingati tragedi bencana banjir yang terjadi di Desa Kemiri. Adanya kegiatan ini tentunya juga memberikan hal positif bagi warga masyarakat Desa Kemiri dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

##### 1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes Kembang dalam pengelolaannya a) membuat AD/ART sebagai landasan kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes b) membentuk pengurus yang terdiri dari badan pengawas, manajer, sekretaris, bendahara dan kepala unit bidang usaha. b) dalam pengelolaannya BUMDes Kembang menerapkan prinsip-prinsip korporatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan subtainabel.

##### 2. Jenis-jenis usaha BUMDes

Jenis-jenis usaha yang dijalankan BUMDes Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti terdiri dari 5 bidang antara lain: pasar desa, HIPPAM, pos desa, ekonomi kreatif dan pertokoan, perdagangan hasil pertanian. Dari lima bidang usaha yang dijalankan oleh BUMDes Kembang empat diantaranya masih terus berjalan sedangkan pertokoan, perdagangan hasil pertanian sejak awal Tahun 2017 difakumkan karena untuk memberikan kesempatan bagi toko-toko yang lain untuk memperjualbelikan dagangannya.

### 3. Kontribusi BUMDes bagi pembangunan ekonomi desa

BUMDes Kembang pada saat ini tidak dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa (PADes) karena hasil pendapatan BUMDes sendiri masih kecil hanya cukup untuk membiayai kegiatan operasional BUMDes. Hanya saja, BUMDes dapat memberikan sebuah kontribusi pada segi pelayanan. Dengan adanya pelayanan ini masyarakat tidak susah lagi dalam melakukan kegiatan pembayaran listrik, pembayaran angsuran, pengiriman barang, uang dan lain sebagainya. Selain itu BUMDes juga memberikan bantuan berupa simpan pinjam perempuan yang dibisa dilakukan oleh kelompok perempuan yang ingin melakukan kegiatan usaha, dan bantuan sosial berupa santunan fakir miskin dan anak yatim, khitanan massal dan pengajian setiap tahun untuk memperingati tragedi banjir yang terjadi di Desa Kemiri.

#### **B. Saran**

Peneliti menemukan saran untuk badan usaha milik desa (BUMDes) di desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang bisa peneliti tulis dalam sekripsi ini di antaranya:

1. Diharapkan lebih memperluas kerja sama dengan instansi-instansi terkait dan masyarakat.
2. Diharapkan lebih meningkatkan dan memaksimal sistem pengelolaan yang ada di BUMDes Kembang.

3. Diharapkan lebih maksimal dalam meningkatkan dan menggali potensi ekonomi yang ada di desa sehingga dapat menciptakan usaha baru yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa.
4. Diharapkan kepada BUMDes untuk dapat lebih memperluas dan meningkatkan kontribusinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto , Edy Yusuf dan Darwanto. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Akhira, Anne. 2012. *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta: Aksara.
- Buku Neraca Keuangan BUMDes Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Pusat Kajian Dinamika Sistem pembangunan (PKDSP), “ Universitas Brawijaya”.
- Fajri,Tasbih. 2015. *Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Fajarwati, Yeni. 2016. *Implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Gunadi dan Djoni. 2013. *Istilah Komunikasi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Herlina. 2012. *Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- <https://jemberkab.go.id/selayang-pandang/penduduk>, 26 Novemer 2017, Jam 05.45 WIB
- <http://desakemiripanti.blogspot.co.id/2016/10/bumdes-kembang-2016> (11juni 2017, 14.30 WIB)
- Jamaluddin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kasiram, Moh. 2008. *Metode Peneliti Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN MALIKI PRESS.
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- Makmur, Syarif. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektifitas Organisasi-Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Meleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munawaroh. 2013. *Panduan Memahami Metode Penelitian*. Malang: Intimedia.
- Nurcholis, Hanif. 2011 . *Pertumbuhan dan Penyelenggaran Pemerintahan Desa*. Erlangga
- Ridlwani, Zulkarnain. 2016. *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa*, (Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung).
- Putra, Anom Surya. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Pasaribu, Vera A. R. 2007. *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Medan: Universitas HKBP Nommense.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan-Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sukidin. 2009. *Ekonomi Pembangunan: Konsep, Teori dan Implementasinya*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Sumodiningrat, Gunawan. 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, Lingkungan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sukasmanto. 2014. *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDesa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPB).
- Sugiarto, Didik G. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solehkhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmasjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penguji. 2017. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Usman, Suyoto. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono, Soekanto. 1999. *Metode Riset Jilid 1*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Soerjono dan Djoenaesih. 1997. *Istilah Komunikasi*. Yogyakarta: Liberty.
- Yustika, Ahmad Erani dan Rukavina Baksh. 2014. *Konsep Ekonomi Kelembagaan Perdesaan, Pertanian & Kedaulatan Pangan*. Malang: Empat Dua.
- Yabbar, Rahmah dan Ardi Hamzah. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Pustaka



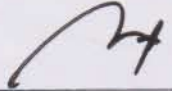
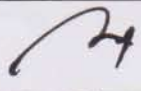
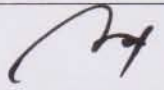
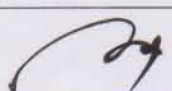
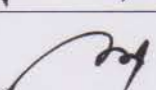
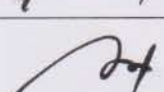
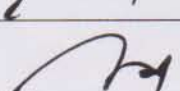
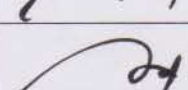


## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS MASALAH
<b>Pembangunan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember</b>	Pembangunan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Ekonomi Desa</li> <li>2. BUMDes</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Masyarakat Desa</li> <li>b. Agroindustri dalam Membangun Pedesaan</li> <li>c. Pembangunan Desa yang Berkelanjutan</li> <li>d. Industrialisasi Desa- <i>Democratic Governance</i></li> <li>a. Pendirian</li> <li>b. Jenis-jenis usaha</li> <li>c. Pengelolaan</li> <li>d. Kontribusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas BUMDes</li> <li>2. pengurus BUMDes</li> <li>3. Anggota BUMDes</li> <li>4. Dokumentasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>2. Jenis penelitian adalah deskriptif</li> <li>3. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi</li> <li>4. Metode analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif</li> <li>5. Validasi data menggunakan uji coba kredibilitas dengan pengujian triangulasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tata kelola/pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember?</li> <li>2. Apa saja sektor usaha yang di miliki BUMDes di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember?</li> <li>3. Bagaimana kontribusi BUMDes bagipembangunanekonomi Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember?</li> </ol>



## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

LOKASI: BUMDES KEMBANG DESA KEMIRI KECAMATAN PANTI  
KABUPATEN JEMBER

No	TANGGAL	Uraian Kegiatan	TTD
1	14 September 2017	Meminta izin penelitian dan melihat kondisi BUMDes Kembang	
2	18 September 2017	Penyerahan surat penelitian kepada manajer BUMDes serta wawancara	
3	04 Oktober 2017	Wawancara dengan pengurus BUMDes	
4	09 Oktober 2017	Meminta data –data BUMDes (profil BUMDes dan data lainnya)	
5	13 Oktober 2017	Wawancara dengan sebagian warga	
6	18 Oktober 2017	Wawancara dengan kepala unit pasar desa dan pedagang	
7	23 Oktober 2017	Wawancara dengan kepala desa Kemiri	
8	25 Oktober 2017	Sekdes Kemiri dan pengawas BUMDes Kembang	
9	27 Oktober 2017	Dokumentasi gedung dan pengurus	
10	30 Oktober 2017	Meminta surat keterangan selesai penelitian	

Jember, 30 Oktober 2017  
Kepala Desa Kemiri



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya BUMDes Kembang?
2. Ada berapa pengurus BUMDes Kembang?
3. Bagaimana perkembangan BUMDes sampai saat ini?
4. Apa saja kendala yang dihadapi BUMDes Kembang?
5. Bagaimana tatakelola yang ada di BUMDes Kembang?
6. Apa saja sektor usaha yang dijalankan oleh BUMDes Kembang?
7. Dengan siapa saja BUMDes Kembang bekerja sama?
8. Berapa pendapatan bidang usaha yang dijalankan BUMDes setiap bulannya?
9. Apakah BUMDes Kembang berkontribusi terhadap pendapatan asli desa ?
10. Bagaimana kontribusi BUMDes terhadap pembangunan ekonomi desa?

IAIN JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136  
website: www.iain-jember.ac.id email: febi.iain.jember@gmail.com

Nomor : B-33/In.20/7.a/PP.00.9/08 /2017  
Lamp : 1 (satu) Lampir  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada:  
Yth. PIMPINAN BUMDES KEMBANG DESA KEMIRI  
Di-  
**J E M B E R**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyelesaian/penyusunan skripsi, mahasiswa Prodi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember. Untuk diizinkan mengadakan penelitian/riset di lingkungan instansi atau lembaga yang di pimpin oleh Bapak/Ibu, adapun mahasiswa tersebut adalah:

Nama : Moh. Maryus  
NIM : 083134043  
Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Semester : IX (Sembilan)

Sedangkan seluruh mekanisme pelaksanaan Penelitian tersebut diberikan kewenangan sepenuhnya kepada mahasiswa untuk mengikuti aturan yang berlaku di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun penelitian akan dimulai pada bulan April s.d Mei 2017.

Penelitian yang akan dilakukan mengenai:  
**Pembangunan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember**

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Jember, 15 Agustus 2017

an. Dekan FEBI,

Anggota Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga,



*Abdul Rokhim*  
**Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I**  
NIP. 19730830 199903 1 002

*Ketua Bumdes  
+ BANTU dan layansi!*

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suryono  
Jabatan : Kepala Desa Kemiri  
Alamat : Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Moh. Maryus  
NIM : 083 134 043  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Institut : IAIN Jember

Telah selesai melakukan penelitian pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Pembangunan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan kepada yang bersangkutan sebagaimana semestinya.

Jember, 30 Oktober 2017

Kepala Desa Kemiri



**Kantor BUMDes Kembang Desa Kemiri Kec. Pantti Kab. Jember**

**(27 Oktober 2017)**



**BUMDes Kembang kerja sama dengan Pos Indonesia Cabang Jember**

**(27 Oktober 2017)**



**Wawancara dengan Ibu Luluk selaku manajer BUMDes (04 Oktober 2017)**



**Wawancara dengan Bapak Suryono selaku kepala Desa Kemiri (23 Oktober 2017)**



**Wawancara dengan Bapak Hadi Wiyono selaku badan pengawas BUMDes Kembang**

**25 Oktober 2017**



**Pasar Desa Kemiri Kec. Panti Kab. Jember (18 Oktober 2017)**



**Wawancara dengan Bpk. Guswanto selaku kepala Unit Pasar Desa (18 Oktober 2017)**



**Wawancara dengan salah satu penjual di pasar Desa Kemiri (18 Oktober 2017)**





## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. MARYUS  
NIM : 083 134 043  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Program : S-1  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Pembangunan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember”** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, dan tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya sebagaimana mestinya karya ilmiah.

Jember, 17 Desember 2017



  
MOH. MARYUS  
NIM. 083 134 043

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Biodata diri :

Nama : Moh. Maryus  
NIM : 083 134 043  
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 17 Desember 1993  
Alamat : RT/RW 025/007 Desa Pakuniran Kecamatan Pakuniran  
Kabupaten Probolinggo  
Jurusan/ Prodi : Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah



### Riwayat pendidikan :

2002-2007 : MI Ihyaul Islam Pakuniran-Probolinggo  
2007-2010 : MTs Sunan Ampel Pakuniran-Probolinggo  
2010-2013 : MA Bahrul Ulum Besuk-Probolinggo  
2013 s/d Sekarang : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

### Pengalaman Organisasi

1. Pengurus OSIS MTs. Sunan Ampel Pakuniran Probolinggo Periode 2008-2009
2. Pengurus OSIS MA. Bahrul Ulum Besuk Probolinggo Periode 2012-2013
3. Pengurus Pondok Pesantren Bahrul Ulum Besuk Probolinggo Periode 2011-2013
4. Pengurus HMPS ES (Himpunan Mahasiswa Program Study Ekonomi Syari'ah)  
IAIN Jember Periode 2015-2016
5. Pengurus DEMA Fakultas IAIN Jember Periode 2016-2017